



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2023

# KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan III TA. 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) selama Triwulan III Tahun 2023 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kegiatan serta kinerja BRPBATPP selama Triwulan III tahun 2023 sebagai organisasi di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pencapaian kinerja untuk kedepannya.

Bogor, 18 Oktober 2023  
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya  
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan



Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si.  
NIP. 197512162003122002



# DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
D. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP.....	5
E. Potensi Permasalahan dan Lingkungan Strategis.....	14
F. Sistematika Laporan Kinerja.....	20
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	30
C. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023.....	31
D. Pengukuran Kinerja.....	40
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>42</b>
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2023.....	42
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Triwulan III Tahun 2023.....	42
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2023.....	122
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	128
<b>IV. PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
A. Capaian Kinerja Utama.....	131
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	134
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>135</b>

# DAFTAR TABEL

<b>NOMOR</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HAL</b>
1.1.	Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan III TA. 2023 Berdasarkan Penempatan Unit Kerja .....	6
1.2.	Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan III TA.2023.....	6
1.3.	Aset BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	15
1.4.	Anggaran BRPBATPP TA.2018-2022.....	17
2.1.	Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2018-2022.....	24
2.2.	Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023.....	28
2.3.	Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan Periode Triwulan III TA.2023.....	32
2.4.	Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Pusat Riset Perikanan (27 Juni 2023).....	32
2.5.	Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan III TA.2023.....	34
2.6.	Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (21 Juni 2023).....	36
2.7.	Perjanjian Kinerja Gabungan antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA.2023.....	37
3.1.	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023.....	43
3.2.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	47
3.3.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	50
3.4.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	53
3.5.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	55
3.6.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	57
3.7.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	79



3.8.	Progres Belanja Modal Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP di Satminkal BRPBATPP Triwulan III TA.2023.....	80
3.9.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	83
3.10.	Akun Penerimaan PNPB Fungsional dan Umum BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	84
3.11.	Penerimaan PNPB BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	84
3.12.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8 pada Triwulan III Tahun 2023.....	86
3.13.	Nama Kompetensi dan Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan.....	88
3.14.	Nilai Kinerja Berdasarkan Nilai SKP.....	88
3.15.	Nilai Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin.....	88
3.16.	Kategori ASN Berdasarkan Nilai IP ASN.....	89
3.17.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 pada Triwulan III Tahun 2023.....	90
3.18.	Kategori Nilai SAKIP.....	91
3.19.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 10 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	92
3.20.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 11 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	94
3.21.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 12 pada Triwulan III Tahun 2023.....	97
3.22.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan III TA.2023.....	98
3.23.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 13 pada Triwulan III Tahun 2023.....	99
3.24.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 14 pada Triwulan III Tahun 2023.....	106
3.25.	Kategori Penilaian Kinerja Anggaran.....	109
3.26.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 15 pada Triwulan III Tahun 2023.....	110
3.27.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 16 pada Triwulan III Tahun 2023.....	112
3.28.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 17 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	118
3.29.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 18 Pada Triwulan III Tahun 2023.....	121
3.30.	Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	124
3.31.	Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 (per jenis belanja).....	124
3.32.	Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	125
3.33.	Realiasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	128
3.34.	Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBATPP Triwulan III TA.2023.....	129
4.1.	Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023.....	132

# DAFTAR GAMBAR

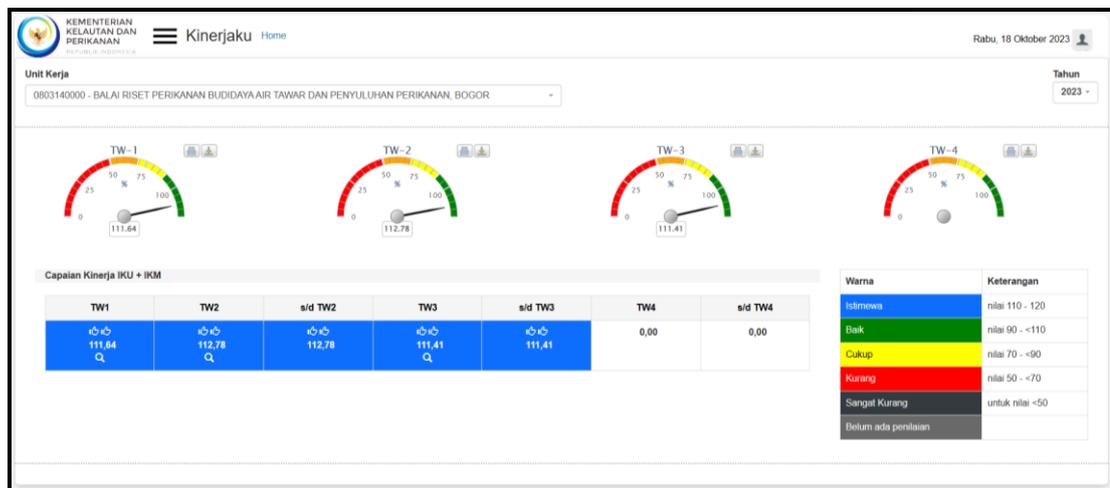
NOMOR	JUDUL GAMBAR	HAL
1.1.	Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.....	5
1.2.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Jabatan Pada Triwulan III TA.2023.....	10
1.3.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Triwulan III TA.2023.....	11
1.4.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Pada Triwulan III TA.2023.....	12
1.5.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Pada Triwulan III TA.2023.....	13
1.6.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Triwulan III TA.2023.....	13
3.1.	Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan III TA. 2023	42
3.2.	Dokumentasi Kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Triwulan III TA.2023.....	61
3.3.	Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP.....	64
3.4.	Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak) pada Triwulan III TA.2023.....	68
3.5.	Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut pada Triwulan III TA.2023.....	73
3.6.	Dokumentasi Kegiatan SFV Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Tawar pada Triwulan III TA.2023.....	78
3.7.	Nilai IP ASN BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 pada <a href="http://www.ropeg.kkp.go.id/">http://www.ropeg.kkp.go.id/</a>	90
3.8.	Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan III TA.2023.....	106
3.9.	Screenshot Dashboard Aplikasi SMART DJA Triwulan III TA.2023.....	110
4.1.	Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan III TA. 2023 pada Dashboard Kinerjaku.....	131



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dalam upaya untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh program kerja BRPBATPP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang diterapkan pada sasaran strategis dalam Rencana Strategi (Renstra) BRPBATPP Tahun 2020-2024, yang diikuti dengan rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten dan berkesinambungan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023. Keempat Sasaran Kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 111,41 sebagaimana dashboard kinerjaku berikut ini :



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan III TA. 2023, dari 18 IK BRPBATPP yang terdapat target ada 8 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki

capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90- <110.

### Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800	2.500	2.668	106,72
	2 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120	40	45	112,50
	3 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268	210	299	142,38 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	-	-
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6 Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1	-	-	-
4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan	7 Nilai PNPB BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,229 (pembulatan ke atas pada aplikasi kinerjaku)	249,50 atau 120,00 (pada aplikasi)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023			
			TARGET	CAPAIAN	%	
Satker				menjadi 0,23)	kinerjaku)	
	8	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5	-	-	-
	9	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
	10	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
	11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
	12	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	133,33	144,93 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
	14	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-
	15	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	16	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
17	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis	100,00	71,53	71,53	100,00	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
	lainnya BRPBATPP (%)				
	18 Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100,00	48,15	48,15	100,00

Secara umum kinerja BRPBATPP cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. IKU dengan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi capaian terutama untuk kegiatan penyuluhan perlu dilakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP. Akhirnya, BRPBATPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan III tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP.



## **PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUJUAN**
- C. TUGAS DAN FUNGSI**
- D. KERAGAAN SDM BRPBATPP**
- E. POTENSI, PERMASALAHAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS**
- F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**



## **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai BRPBATPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRPBATPP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan BRPBATPP sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisa mendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BRPBATPP diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
2. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja kepada Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, BRPBATPP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2023 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Triwulan III Tahun Anggaran 2023 yang dilaporkan pada akhir Triwulan III Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan III TA.2023 memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III Tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBATPP untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 74/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar dibidang perbenihan dan genetik populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

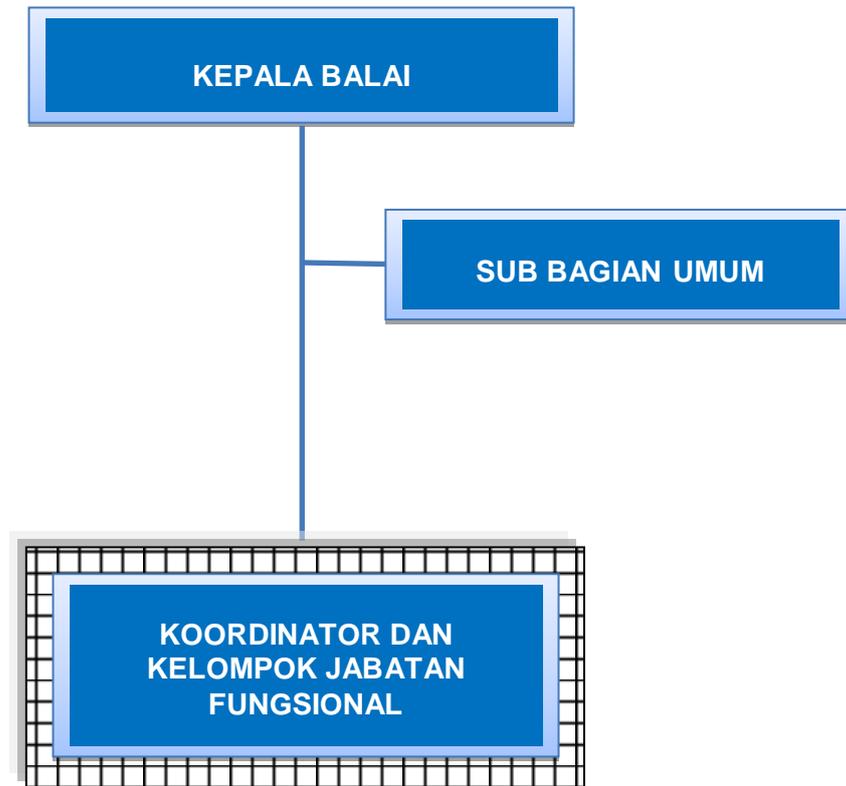
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Berikut adalah struktur organisasi di BRPBATPP berdasarkan Permen KP Nomor : 74/PERMEN-KP/2020.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

#### **D. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA BRPBATPP**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP Nomor : 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBATPP. BRPBATPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air tawar dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 41 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu : Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor pada bulan September 2023 adalah sebanyak 423 orang yang terdiri dari 215 ASN (terdiri dari 43 orang PNS non Penyuluh Perikanan, 151 orang PNS Penyuluh Perikanan, dan 21 orang Penyuluh Perikanan PPPK) dan

208 tenaga kontrak (terdiri dari 47 orang tenaga kontrak serta 161 orang penyuluh perikanan bantu). Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur, Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk, dan Instalasi Riset Lingkungan Perikanan dan Toksikologi Cibalagung dan Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan Depok. Berikut adalah jumlah pegawai BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan penempatan unit kerja yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan III TA. 2023 Berdasarkan Penempatan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Sempur	30	-	16	46
2.	Instalasi Riset Plasma Nutfah Budidaya Air Tawar, Cijeruk	5	-	13	18
3.	Instalasi Teknologi, Lingkungan, dan Toksikologi Perikanan Budidaya Air Tawar, Cibalagung	7	-	8	15
4.	Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan, Depok	1	-	10	11
5.	Penyuluh Perikanan (41 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat)	151	21	161	333
<b>Total</b>		<b>194</b>	<b>21</b>	<b>208</b>	<b>423</b>

Keragaan sumberdaya manusia BRPBATPP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional, tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin pada Triwulan III tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan III TA.2023

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
<b>I.</b>	<b>Berdasarkan Jenis Jabatan</b>		
1.	Kepala Balai (Instruktur Madya)	1	0,47
2.	Kasubbag Umum	1	0,47
3.	Instruktur	2	0,93
4.	Penyuluh Perikanan (PNS)	151	70,23
5.	Penyuluh Perikanan (PPPK)	21	9,77
6.	Pustakawan	1	0,47

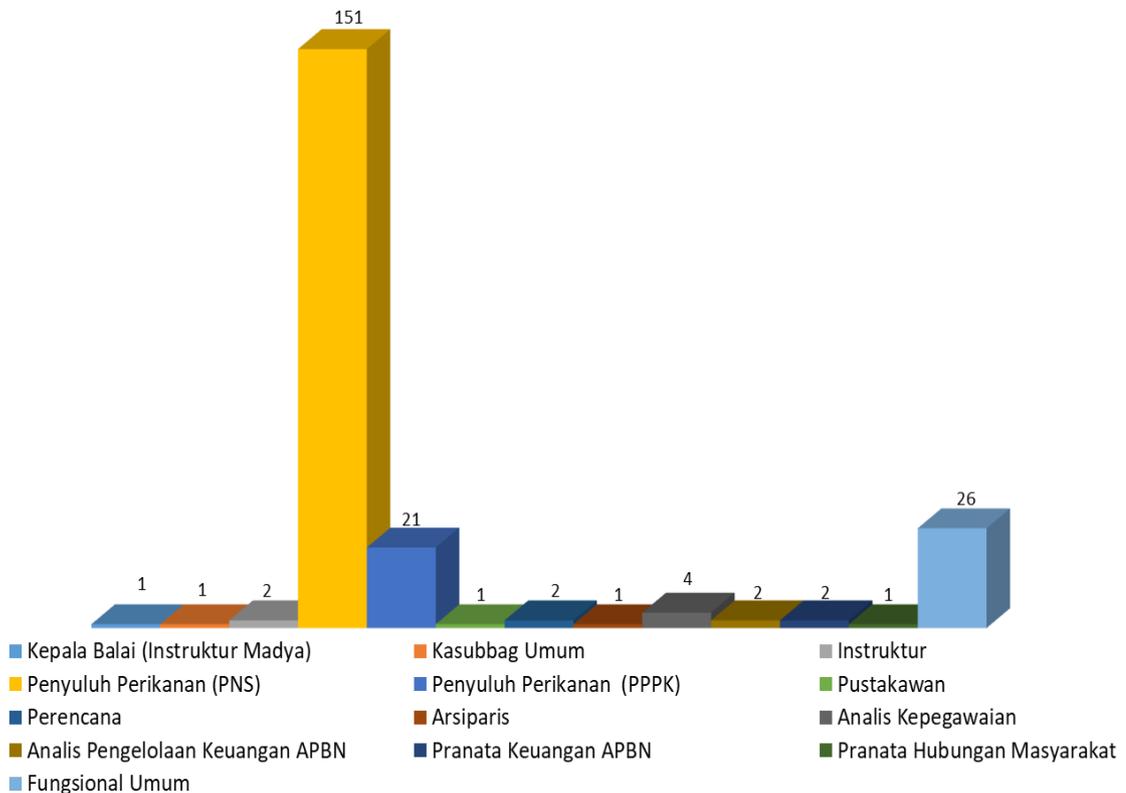
No.	Uraian	Jumlah Orang	%
7.	Perencana	2	0,93
8.	Arsiparis	1	0,47
9.	Analisis Kepegawaian	4	1,86
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	0,93
11.	Pranata Keuangan APBN	2	0,93
12.	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0,47
13.	Fungsional Umum	26	12,09
	<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Penyuluh</b>		
1.	Penyuluh Perikanan Madya	37	21,51
2.	Penyuluh Perikanan Muda	60	34,88
3.	Penyuluh Perikanan Pertama	34	19,77
4.	Penyuluh Perikanan Penyelia	9	5,23
5.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	11	6,40
6.	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Mahir	21	12,21
	<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Instruktur</b>		
1.	Instruktur Ahli Utama	0	0,00
2.	Instruktur Ahli Madya	1	33,33
3.	Instruktur Ahli Muda	0	0,00
4.	Instruktur Ahli Pertama	2	66,67
5.	Instruktur Penyelia	0	0,00
6.	Instruktur Mahir	0	0,00
7.	Instruktur Terampil	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pustakawan</b>		
1.	Pustakawan Utama	0	0,00
2.	Pustakawan Madya	0	0,00
3.	Pustakawan Muda	1	100,00
4.	Pustakawan Pertama	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Perencana</b>		
1.	Perencana Ahli Utama	0	0,00
2.	Perencana Ahli Madya	0	0,00
3.	Perencana Ahli Muda	0	0,00
4.	Perencana Ahli Pertama	2	100,00
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
<b>VI.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Kepegawaian</b>		
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Utama	0	0,00
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	0	0,00
3.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	25,00
4.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	3	75,00
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Arsiparis</b>		
1.	Arsiparis Ahli Utama	0	0,00
2.	Arsiparis Ahli Madya	0	0,00
3.	Arsiparis Ahli Muda	1	100,00
4.	Arsiparis Ahli Pertama	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN</b>		
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	0	0,00
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	0	0,00
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	100,00
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Keuangan</b>		
1.	Pranata Keuangan Penyelia	1	50,00
2.	Pranata Keuangan Mahir	1	50,00
3.	Pranata Keuangan Terampil	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>X.</b>	<b>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Humas</b>		
1.	Pranata Humas Madya	0	0,00
2.	Pranata Humas Muda	1	100,00
3.	Pranata Humas Pertama	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>		
1.	S3	2	0,93
2.	S2	21	9,77
3.	S1	101	46,98
4.	D4	30	13,95
4.	D3	31	14,42
5.	SMA	27	12,56
6.	SMP	2	0,93
7.	SD	1	0,47

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
	<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>100,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Berdasarkan Golongan</b>		
1.	Golongan I	0	0,00
2.	Golongan II	26	12,09
3.	Golongan III	129	60,00
4.	Golongan IV	39	18,14
5.	Golongan IX (PPPK)	21	9,77
	<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>100,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Berdasarkan Kelompok Umur</b>		
1.	≤25	1	0,47
2.	25 - 35 tahun	30	13,95
3.	36 – 45 tahun	100	46,51
4.	46 – 55 tahun	51	23,72
5.	≥56 tahun	16	7,44
6.	≥ 58 tahun	17	7,91
	<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>100,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>		
1.	Laki-laki	136	62,79
2.	Perempuan	80	37,21
	<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>100,00</b>

Keragaan sumberdaya manusia di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) apabila dilihat dari tabel di atas, dapat digolongkan ke dalam jenis jabatan fungsional dan non fungsional, jenjang fungsional peneliti, jenjang fungsional penyuluh, jenjang fungsional litkayasa, jenjang fungsional pustakawan, tingkat pendidikan, golongan, kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan melihat keragaan SDM BRPBATPP tersebut, diharapkan dapat menjadi faktor kekuatan bagi BRPBATPP untuk menjadi balai riset perikanan budidaya air tawar dan juga sekaligus sebagai balai penyuluhan perikanan yang mumpuni yang dapat mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan nantinya.

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, keragaan sumberdaya manusia di BRPBATPP berdasarkan jenis jabatannya dapat digambarkan pada grafik dan diagram berikut ini.

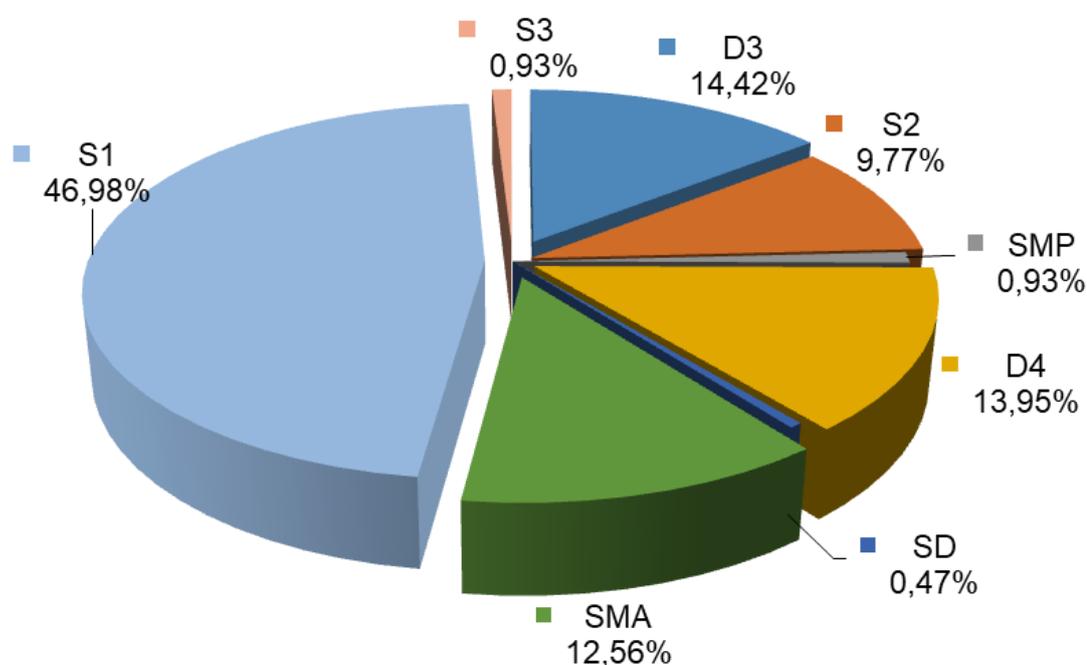


Gambar 1.2. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Jabatan Pada Triwulan III TA.2023

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa urutan jumlah pegawai BRPBATPP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional untuk SDM BRPBATPP adalah sebagai berikut : (1)Penyuluh Perikanan (PNS) sebanyak 151 orang, (2)Fungsional Umum sebanyak 26 orang, (3)Penyuluh Perikanan (PPPK) sebanyak 21 orang, (4) Analis Kepegawaian sebanyak 4 orang, (5)Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Perencana, dan Instruktur masing-masing sebanyak 2 orang, dan (6)Kepala Balai. Kasubbag Umum, Pranata hubungan masyarakat, pustakawan, dan arsiparis masing-masing sebanyak 1 orang.

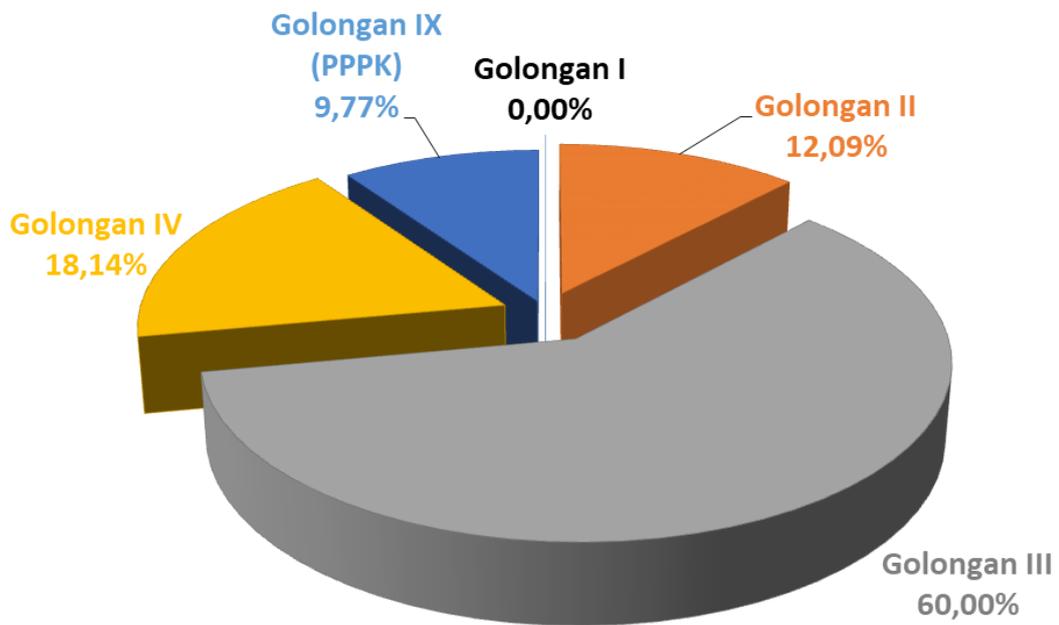
Komposisi SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : (1)Tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 101 orang (46,98%), (2) Tingkat pendidikan D3 sebanyak 31 orang (14,42%), (3)Tingkat pendidikan D4 sebanyak 30 orang (13,95%), (4)Tingkat pendidikan SMA masing-masing sebanyak 27 orang (12,56%), (5)Tingkat pendidikan S2 sebanyak 21 orang (9,77%), (6)Tingkat

pendidikan S3 dan SMP masing-masing sebanyak 2 orang (0,93%), dan (7)Tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang (0,47%). Gambaran SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 1.3. berikut ini.



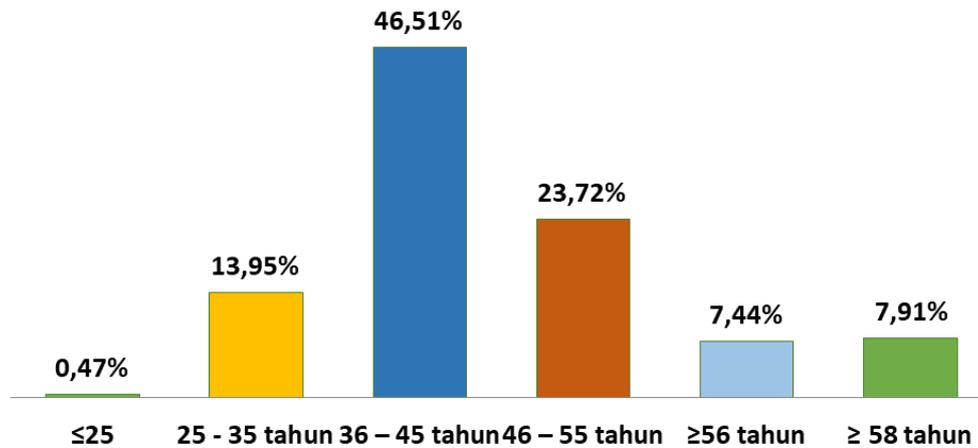
Gambar 1.3. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Triwulan III TA.2023

Selain keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat juga keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan golongan ruang. Golongan ruang III mendominasi jumlah pegawai BRPBATPP yaitu sebanyak 129 orang (60,00%), diikuti oleh golongan IV sebanyak 39 orang (18,14%), golongan II sebanyak 26 orang (12,09%), golongan IX (PPPK) sebanyak 21 orang (9,77%), sedangkan untuk golongan I sudah tidak terdapat staf yang memiliki golongan I. Berikut diagram keragaan SDM berdasarkan golongan ruang sebagaimana tersaji pada Gambar 1.4. berikut ini.



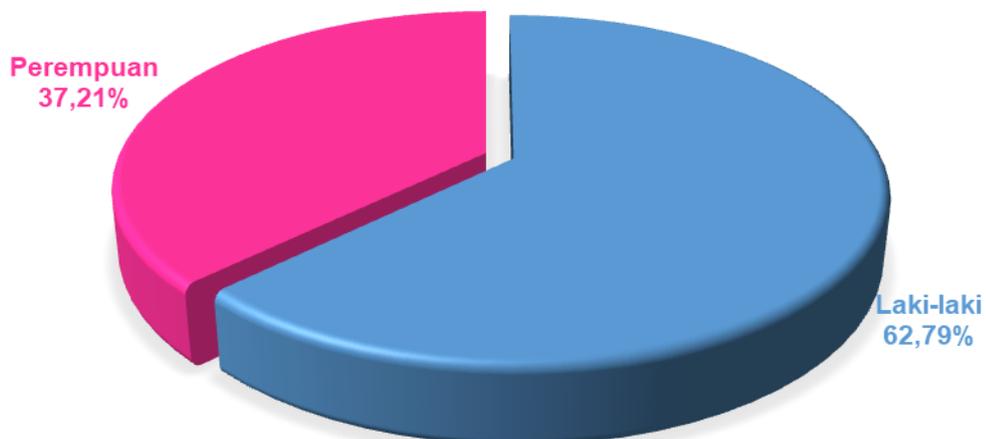
Gambar 1.4. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Pada Triwulan III TA.2023

Keragaan SDM BRPBATPP dapat dilihat juga berdasarkan kelompok umur yang dibagi menjadi 6 (enam) kelompok. Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dilihat komposisi umur dengan urutan sebagai berikut : (1)Kelompok umur 36–45 tahun dengan jumlah 100 orang (46,51%), (2)Kelompok umur 46-55 tahun dengan jumlah 51 orang (23,72%), (3)Kelompok umur 25–35 tahun dengan jumlah 30 orang (13,95%), (4)Kelompok umur  $\geq 58$  tahun dengan jumlah 17 orang (7,91%), (5)kelompok umur  $\geq 56$  tahun dengan jumlah 16 orang (7,44%), dan (6) Kelompok umur  $\leq 25$  tahun dengan jumlah 1 orang (0,47%). Sebagai gambaran keragaan SDM BRPBATPP dilihat dari kelompok umur dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1.5. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Pada Triwulan III TA.2023

Data keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin juga diperlukan dalam rangka menyajikan informasi terkait kesetaraan gender di lingkup BRPBATPP. Berikut ini diagram yang menyajikan jumlah SDM yang ada di BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 1.6. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Triwulan III TA.2023

Pada gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BRPBATPP lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 135 orang (62,79%) jika dibandingkan dengan perempuan yaitu sejumlah 80 orang (37,21%). Hal ini disebabkan karena BRPBATPP merupakan balai riset perikanan dan

penyuluhan sehingga lebih banyak kegiatan yang dilakukan di lapangan yang membutuhkan pegawai laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pegawai perempuan. Namun demikian, BRPBATPP tetap berupaya dalam mengikuti program pemerintah dalam melakukan penyetaraan gender dengan tetap melibatkan pegawai perempuan dalam melakukan aktivitas perkantoran maupun kegiatan riset dan penyuluhan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai perempuan.

Untuk meningkatkan kualitas serta kapabilitas SDM Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, maka balai selalu mendorong pegawainya baik yang fungsional maupun non fungsional untuk mengembangkan kemampuannya melalui tugas belajar dan ijin belajar dengan berbagai jenjang pendidikan, serta melalui diklat maupun pelatihan. Untuk kedepannya, diharapkan dengan komposisi SDM BRPBATPP tersebut dapat mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BRPBATPP sebagai lembaga riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

## **E. POTENSI, PERMASALAHAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Potensi dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan meliputi sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta anggaran yang mendukung kegiatan. Sumberdaya manusia yang mendukung BRPBATPP terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta pejabat fungsional umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan BRPBATPP sebagaimana yang disebutkan pada keragaan SDM sebelumnya.

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBATPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air tawar yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBATPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBATPP s/d Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Aset BRPBATPP Semester I Tahun 2023

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
<b>A</b>	<b>TANAH</b>		<b>95.685.186.000</b>
1	Tanah persil (m <sup>2</sup> )	16.345	52.488.531.000
2	Tanah non persil (m <sup>2</sup> )	35.940	43.196.655.000
<b>B</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>34.186.988.459</b>
1	Alat besar darat (Unit)	3	339.040.934
2	Alat bantu (Unit)	68	275.755.424
3	Alat angkutan darat bermotor (Unit)	10	2.054.647.242
4	Alat angkutan darat tak bermotor (Unit)	3	2.117.663
5	Alat bengkel bermesin (Unit)	1	4.500.000
6	Alat ukur (Unit)	10	117.076.465
7	Alat pengolahan (Unit)	103	718.714.310
8	Alat kantor (Unit)	317	1.024.080.364
9	Alat rumah tangga (Unit)	1.767	3.857.793.693
10	Alat studio (Unit)	27	212.926.305
11	Alat komunikasi (Unit)	18	33.850.000
12	Peralatan pemancar (Unit)	8	1.027.396.014
13	Alat kedokteran (Unit)	18	1.199.422.936
14	Unit Alat Laboratorium (Unit)	742	20.385.975.471
15	Unit Alat Laboratorium kimia nuklir (Unit)	17	658.775.273
16	Alat Laboratorium fisika nuklir/elektronika (Unit)	5	143.332.060
17	Alat Laboratorium lingkungan hidup (Unit)	27	356.937.573
18	Peralatan Laboratorium hydrodinamica (Unit)	1	12.635.000
19	Laboratorium Alat standarisasi kalibrasi & (Unit)	7	81.376.102
20	Persenjataan non senjata api (Unit)	1	12.430.000
21	Alat khusus kepolisian (Unit)	2	24.860.000
22	Komputer Unit (Unit)	105	1.163.939.121
23	Peralatan Komputer (Unit)	67	257.402.826
24	Alat pelindung (Unit)	2	841.565
25	Alat kerja penerbangan (Unit)	3	27.520.000
26	Unit Peralatan proses/produksi (Unit)	45	193.642.118
<b>C</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>42.431.883.500</b>
1	Bangunan gedung tempat kerja (Unit)	93	38.649.306.500

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
2	Bangunan gedung tempat tinggal (Unit)	20	1.799.779.000
3	Tugu/tanda batas (Unit)	5	1.982.798.000
<b>D</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>381.691.000</b>
1	Jalan	1.887	245.882.000
2	Jembatan	30	135.809.000
<b>E</b>	<b>IRIGASI</b>		<b>662.585.000</b>
1	Bangunan air irigasi (Unit)	17	468.489.000
2	Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan (Unit)	2	32.319.000
3	Bangunan pengembangan sumber air dan tanah (Unit)	2	157.784.000
4	Bangunan air bersih/air baku (Unit)	1	3.993.000
<b>F</b>	<b>JARINGAN</b>		<b>1.007.968.320</b>
1	Instalasi air bersih/air baku (Unit)	1	49.939.700
2	Instalasi gardu listrik (Unit)	2	328.572.170
3	Instalasi gas (Unit)	1	5.055.000
4	Jaringan listrik (Unit)	2	624.401.450
<b>G</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>275.652.000</b>
1	Bahan perpustakaan tercetak (Unit)	375	250.652.000
2	Alat bercorak kebudayaan (Unit)	1	25.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>174.631.954.279</b>

Sumber : Data BMN BRPBATPP Semester I Tahun 2023

Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari dua (2) buah Pusat yaitu : (1) Pusat Riset Perikanan untuk kegiatan riset dan kegiatan pendukungnya; dan (2) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan.

Penganggaran BRPBATPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari dua (2) Eselon II / Pusat yaitu : (1) Pusat Riset Perikanan untuk kegiatan riset; dan (2) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan.

Anggaran BRPBATPP pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4. Anggaran BRPBATPP TA.2018-2022

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Tahun (Rp.000)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Pegawai	55.321.876	48.374.369	41.267.109	37.934.850	35.234.181
2.	Belanja Barang	12.366.286	18.833.404	15.899.721	15.075.908	12.960.142
3.	Belanja Modal	4.351.472	-	132.824	410.738	190.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>72.039.634</b>	<b>67.207.773</b>	<b>57.299.654</b>	<b>53.421.496</b>	<b>48.384.323</b>

Sumber : Data DIPA BRPBATPP Tahun 2018 - 2022

Pada tahun 2018, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan sebesar Rp.58.386.193.000,- (427,63%). Peningkatan ini disebabkan oleh bergabungnya penyuluh perikanan dari 3 Propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) sebanyak 227 orang dibawah Satminkal Bogor sehingga belanja pegawai meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2019, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan sebesar Rp.4.831.861.000,- (6,71%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 183 orang serta tidak adanya belanja modal. Pada tahun 2020, anggaran BRPBATPP kembali mengalami penurunan sebesar Rp.9.908.119.000,- (14,74%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 163 orang serta menurunnya belanja barang. Pada tahun 2021, anggaran BRPBATPP kembali mengalami penurunan sebesar Rp.3.979.158.000,- (6,94%) yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2022, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan kembali sebesar Rp.5.037.173.000,- (9,42%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berpindahya sebagian besar peneliti dan litkayasa ke BRIN serta menurunnya belanja barang dan belanja modal.

Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBATPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2018–2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;

2. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
3. Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
4. Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
5. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
6. Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;
7. Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan sampling produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sampai dengan akhir September 2023, jumlah penyuluh perikanan yang terdapat di BRPBATPP adalah sebanyak 333 orang yang terdiri dari 151 orang PNS, 21 orang PPPK, dan 161 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) yang tersebar di 41 Kabupaten / Kota di 3 propinsi, yaitu Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.

Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh BRPBATPP dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan perikanan untuk mendukung pembangunan KP antara lain :

- 1) Kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh Ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRPBATPP untuk mendukung BRSDM sebagai Inhouse Consultant lebih optimal, belum tersedia.
- 2) Sarana dan prasarana Riset belum sepenuhnya ter-update mengikuti perkembangan kebutuhan riset.
- 3) Kegiatan dan pemanfaatan hasil riset yang terintegrasi lintas eselon I dan eselon II lingkup BRSDM belum sepenuhnya terbangun.
- 4) Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
- 5) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- 6) Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- 7) Sistem monitoring terhadap penyuluh perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayah terlalu luas dengan anggaran monitoring yang kurang memadai.

BRPBATPP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset perikanan, khususnya riset perikanan budidaya air tawar serta kegiatan penyuluhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri KP No.74 Tahun 2020. Fokus riset yang dikembangkan adalah riset pada ikan air tawar spesifik lokal potensial atau ikan-ikan asli perairan Indonesia yang memiliki potensi untuk dijadikan komoditas nasional bahkan ekspor, contohnya yaitu ikan tor, baung, gabus, gurame, tapah, udang galah dan lain-lain. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan Presiden No.33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset dan Inovasi Nasional”, sehingga BRPBATPP sudah tidak melaksanakan fungsi riset di bidang perikanan air tawar.

Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBATPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes) BRPBATPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) BRPBATPP. Selanjutnya dilakukan analisa SWOT yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BRPBATPP kedepannya.

Beberapa arah kebijakan BRPBATPP yang terkait kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah :

- 1) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.
- 2) Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme 42 Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.
- 3) Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
- 4) Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan mendukung program terobosan KKP melalui kegiatan penyuluhan sebagai berikut :

- 1) Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP;
- 2) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
- 3) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi);
- 4) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan;
- 5) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- 6) Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKJ)**

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan akhir Juni tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) pada akhir Triwulan III Tahun 2023 terhadap rencana / target kinerja (*performance plans*) Triwulan III Tahun 2023. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan ringkasan dari laporan kinerja periode tahun berjalan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III TA. 2023
- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM BRPBATPP, dan sistematika Laporan Kinerja;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan Rencana Strategis BRPBATPP tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja BRPBATPP TA. 2023, serta Pengukuran Kinerja;

- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan hasil capaian dari indikator-indikator kinerja serta analisisnya pada akhir Triwulan III TA.2023;
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan III TA.2023 beserta permasalahan dan rekomendasinya;



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS**
- B. RENCANA KERJA TAHUNAN**
- C. PERJANJIAN KINERJA**
- D. PENGUKURAN KINERJA**



## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu *“Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”*. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRPBATPP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRPBATPP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan penyuluhan.

Pembentukan BRSDM KP termasuk didalamnya BRPBATPP selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan lptek sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya.

Keberadaan BRPBATPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM KP melalui kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan KP dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, BRPBATPP telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Penyuluhan KP. Kegiatan Penyuluhan KP mulai masuk ke dalam DIPA BRPBATPP pada tahun 2018. Adapun Indikator Kinerja/Output dan capaiannya untuk tahun 2018-2022 yang menjadi tanggung jawab BRPBATPP dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TARGET					CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Penyuluh Yang Melakukan Penyuluhan	220	455	-	-	-	220	455	-	-	-
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	4.478	3.411	3.464	3.464	3.546	4.478	3.411	3.520	4.156	3.679
3	Percontohan Penyuluhan KP	1	3	1	1	3	1	3	1	1	3
4	Legalisasi Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendirian Koperasi Sektor KP	681	636	-	-	-	681	636	-	-	-
5	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	-	-	205	-	-	-	-	246	-	-
6	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	-	-	215	-	-	-	-	258	-	-
7	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina	-	-	576	-	-	-	-	580	-	-
8.	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP	-	-	-	75	137	-	-	-	81	146
9.	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP	-	-	-	150	268	-	-	-	180	452

NO	INDIKATOR	TARGET					CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
10.	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP	-	-	-	-	1.084	-	-	-	-	1.106
11.	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

## 1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRPBATPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung Visi Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berlandaskan pada Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” melalui riset dan inovasi iptek perikanan serta penyelenggaraan penyuluhan.

## 2. Misi

Misi BRPBATPP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### 3. Tujuan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan 2 (dua) Pusat, yaitu Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 harus mampu menjalankan tujuan dari Pusat Riset Perikanan maupun Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPBATPP selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi perikanan budidaya air tawar yang berdaya saing.
3. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi perikanan budidaya air tawar mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

### 4. Sasaran

Renstra BRPBATPP tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPBATPP dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Score Card (BSC). Pada tahun 2023 telah dilakukan Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis BRPBATPP Nomor 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021.

Beberapa indikator yang disesuaikan volume targetnya, narasi serta satuannya antara lain:

- a. Perubahan target indikator “Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP” dari 137 kelompok menjadi 120 kelompok yang disesuaikan berdasarkan jumlah SDM Penyuluh dibawah Satminkal BRPBATPP, jumlah kelompok yang disuluh yang diharapkan dapat meningkat kelasnya dibawah Satminkal BRPBATPP serta target IKU atasan;
- b. Perubahan target indikator “Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP” dari 3.546 kelompok menjadi 3.800 kelompok yang disesuaikan dengan jumlah anggaran pendukungnya serta target IKU atasan;
- c. Perubahan target indikator kinerja “Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP” dari 1.084 orang menjadi 889 orang yang disesuaikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP yang terdiri dari PPB, PPS, dan UMKM yang disuluh.
- d. Perubahan narasi indikator “Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di Satminkal BRPBATPP” menjadi “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP” serta perubahan target dan satuan indikator kinerja dari 1 produk menjadi 5 kelompok yang disesuaikan berdasarkan capaian IKU Tahun 2021 serta target IKU atasan;
- e. Indikator kinerja “Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP” tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena tidak ada target untuk indikator kinerja tersebut dari atasan;
- f. Indikator kinerja “Hasil riset BRPBATPP yang Dimanfaatkan oleh Sektor Industri” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- g. Indikator kinerja “Hasil riset Produk biologi hasil riset BRPBATPP” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- h. Indikator kinerja “Hasil riset Teknologi hasil riset BRPBATPP” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- i. Perubahan narasi Indikator kinerja “Jejaring dan/atau kerjasama riset BRPBATPP yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti” menjadi “Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP” serta perubahan target yang semula tidak ada target menjadi 2 kemitraan;

- j. Perubahan target Indikator kinerja “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP (%)” dari  $\leq 1\%$  menjadi  $\leq 0,5\%$ ;
- k. Perubahan target indikator “Persentase unit kerja BRPBATPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” dari 86 menjadi 92 menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya serta target atasan;
- l. Perubahan narasi Indikator Kinerja “Nilai NKA BRPBATPP” menjadi “Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP” dan perubahan target dari 81 menjadi 82 sesuai dengan target atasan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP, maka terdapat arahan untuk mencantumkan 2 (dua) Indikator kinerja yang baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu:

1. Nilai PM SAKIP BRPBATPP (nilai) dengan target 80,5
2. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 75%

Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Renstra	PK	Keterangan
SK.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	IKSK.01.01	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	4.175	3.800	
		IKSK.01.02	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	75	120	
		IKSK.01.03	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	150	268	
		IKSK.01.04	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	-	889	
SK.02	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	IKSK.02.01	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	4	5	
SK.03	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan	IKSK.03.01	Nilai PNBK BRPBATPP (Rupiah Miliar)	-	0,09	IKU baru pada tahun 2023 arahan dari atasan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Renstra	PK	Keterangan
Satker	IKSK.03.02	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	1	0,5		
	IKSK.03.03	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	75	78		
	IKSK.03.04	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	-	81		
	IKSK.03.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	80	92		
	IKSK.03.06	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	84	92		
	IKSK.03.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	75	IK Mandatory baru pada tahun 2023 arahan dari atasan	
	IKSK.03.08	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	89		
	IKSK.03.09	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	86	82		
	IKSK.03.10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	-	2		
	IKSK.03.11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	100		
	IKSK.03.12	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	100		

Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP”, dengan target pada tahun 2023 sejumlah 120 kelompok.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah” Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat” dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai PNBK BRPBATPP, dengan target pada tahun 2023 sejumlah 0,09 Milyar.
- 2) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP, dengan target pada tahun 2023 sebanyak 889 orang.

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BRPBATPP melalui Sasaran Strategis ke Sembilan (SS-9) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja :

- 1) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022 (%) dengan target 1% dari tahun 2021–2024;
- 2) Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) dengan target 73 pada tahun 2021 dan menjadi 76 pada tahun 2024;
- 3) Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai) dengan target 80,5 pada tahun 2023;
- 4) Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai) dengan target 80% dari tahun 2021–2024;
- 5) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%) dengan target 84% dari tahun 2021–2024;
- 6) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 75% pada tahun 2023;
- 7) Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai) dengan target 89 dari tahun 2021–2024;
- 8) Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai) dengan target 86 dari tahun 2021–2024;
- 9) Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan) dengan target 2 kemitraan pada tahun 2023;
- 10) Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%) dengan target 100% dari tahun 2021–2024;
- 11) Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%) dengan target 100% dari tahun 2021–2024.

## **B. RENCANA KERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, rencana kerja BRPBATPP Tahun 2023 meliputi 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp.47.130.248.000,- yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp.10.265.280.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp.36.864.968.000,-.

Sampai dengan akhir Triwulan III TA.2023, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPBATPP sebanyak 4 kali, yaitu :

1. Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 9 Februari 2022. Revisi dilaksanakan dalam rangka revisi halaman III DIPA. Revisi ke 01 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.130.248.000,-.

2. Revisi 02 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 02 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 29 Mei 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka pencatatan pagu pemanfaatan PNPB lingkup BRPBATPP TA 2023. Terdapat penambahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sejumlah 1 unit. Revisi ke 02 ini mengubah pagu anggaran awal karena terdapat penambahan 1 unit Rincian Output (RO) Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP, sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp.47.451.864.000.

3. Revisi 03 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 03 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 11 Juli 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka Revisi halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD). Revisi ke 03 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.451.864.000.

4. Revisi 04 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 04 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 15 September 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka Revisi halaman III DIPA dalam rangka pemutakhiran data POK. Revisi ke 04 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.451.864.000.

### **C. PERJANJIAN KINERJA (PK) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja BRPBATPP Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Balai Riset Penelitian Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Eselon II terkait, yaitu Kepala Pusat Riset Perikanan

dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja (IK) dan target.

## 1. PERJANJIAN KINERJA BRPBATPP DENGAN PUSAT RISET PERIKANAN

Perjanjian kinerja awal level 3 BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan pada tahun 2023 ini terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini, telah dilaksanakan revisi perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan Periode Triwulan III TA.2023

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
<b>I.</b>	<b>Revisi I</b>		
1.	Pejabat penanda tangan Perjanjian Kinerja di BRPBATPP	Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si. (Plt. Kepala BRPBATPP)	Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si. (Kepala BRPBATPP)
2.	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	10 Januari 2023	27 Juni 2023

Adapun rincian perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Pusat Riset Perikanan (27 Juni 2023)

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN	78

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		BRPBATPP (Indeks)	
		4 Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
		7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		10 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		11 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100

## 2. PERJANJIAN KINERJA BRPBATPP DENGAN PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perjanjian kinerja level 3 BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini, telah dilaksanakan revisi perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan III TA.2023

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
<b>I. Revisi I</b>			
1.	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	10 Januari 2023	21 Juni 2023
2.	Pagu anggaran	Rp. 33.891.141.000	Rp. 34.212.757.000
3.	Sasaran Kegiatan	Terdapat 3 sasaran kegiatan	Terdapat 4 sasaran kegiatan. 1. Terdapat penambahan 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4.	Indikator Kinerja	Terdapat 6 indikator kinerja	Terdapat 7 indikator kinerja. 1. Terdapat penambahan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : IK6 “Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit) “ dengan target 1 unit 2. Terdapat perubahan beberapa narasi Indikator kinerja, yaitu : (1) IK1 “Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)” berubah menjadi “Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRBATPP (Kelompok)” (2) IK2 “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)” berubah

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
			<p>menjadi “Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)”</p> <p>(3) IK3 “Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)” berubah menjadi “Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)”</p> <p>(4) IK5 “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)” menjadi “Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)”</p>
<b>I.</b>	<b>Revisi II</b>		
1.	Pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja di BRPBATPP	Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si. (Plt. Kepala BRPBATPP)	Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si. (Kepala BRPBATPP)
2	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	21 Juni 2023	10 Juli 2023

Adapun rincian perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (10 Juli 2023)

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1
4.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

Dari kedua perjanjian kinerja antara BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersebut selanjutnya digabung dengan dilakukan penyesuaian terhadap urutan indikator kinerja sesuai dengan urutan Sasaran Kegiatan yang mengacu pada perjanjian kinerja KKP, BRSDM KP, Pusat Riset Perikanan, dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Berikut tabel yang menyajikan perjanjian kinerja gabungan antara BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Gabungan antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA.2023

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2.	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1
4.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		8	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		9	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		10	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja	92

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		BRPBATPP (Nilai)	
	12	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
	13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
	14	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
	15	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
	16	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
	17	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100
	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, BRPBATPP memiliki 3 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Untuk setiap sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan pada tahun 2023 untuk semua Sasaran Kegiatan adalah berjumlah 18 Indikator Kinerja (IK).

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan BRPBATPP pada tahun 2023, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  
Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan  
Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output :

1) Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3.805 Kelompok Masyarakat)

Rincian Output :

- a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (3.800 Kelompok Masyarakat)
- b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan (5 Kelompok Masyarakat)

2) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (1 Unit)

Rincian Output :

- a. Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP (1 Unit)

## 2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

1) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal (4 layanan)

- a. Layanan BMN (1 layanan)
- b. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan)
- c. Layanan Umum (1 layanan)
- d. Layanan Perkantoran (1 layanan)

2) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal (42 orang)

- a. Layanan Manajemen SDM (42 orang)

3) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3 dokumen)

- a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen)
- b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen)
- c. Layanan Manajemen Keuangan (1 dokumen)

Perjanjian kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi atau inisiatif strategis adalah kegiatan yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung

jawab indikator kinerja yang dibagi oleh Kepala BRPBATPP ke subbagian umum, koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

Rencana aksi BRPBATPP disusun pada awal tahun atau setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan dilakukan revisi jika diperlukan. Rencana aksi berisi target output / volume dan progres fisik masing-masing kegiatan yang menjadi pendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP per bulan dalam tahun 2023.

#### **D. PENGUKURAN KINERJA**

##### 1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual Indikator Kinerja yang ada pada masing-masing Indikator.

Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum Ada Penilaian	

## 2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPBATPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah ditugaskan kepada Sub-Tim Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala BRPBATPP Nomor:B.16/BRSDM-BRPBATPP/RC.600/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.



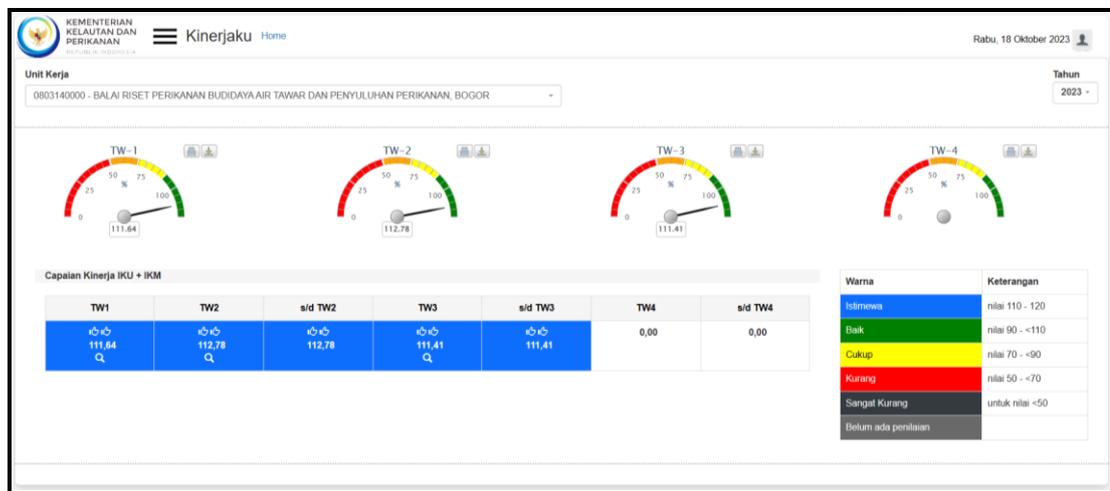
## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TRIWULAN III TAHUN 2023**
- B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA  
TRIWULAN III TAHUN 2023**
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN  
III TAHUN 2023**
- D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI  
SUMBERDAYA BRPBATPP TRIWULAN III  
TAHUN 2023**



## A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN III TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan III Tahun 2023 sebesar 111,41%, yang dapat dilihat pada dashboard kinerja sebagai berikut :



Gambar 3.1. Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan III TA. 2023

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan III TA. 2023, dari 18 IK BRPBATPP yang terdapat target ada 8 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90-<110.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPBATPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja (IK) BRPBATPP pada Sasaran Kegiatan di Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800	2.500	2.668	106,72
	2 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120	40	45	112,50
	3 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268	210	299	142,38 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP	5	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023				
			TARGET	CAPAIAN	%		
	(kelompok)						
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1	-	-	-
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,229 (pembulatan ke atas pada aplikasi kinerjaku menjadi 0,23)	249,50 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		8	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
		10	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
		12	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	133,33	144,93 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
		14	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023			
			TARGET	CAPAIAN	%	
	15	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	16	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
	17	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100,00	71,53	71,53	100,00
	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100,00	48,15	48,15	100,00

Catatan : Data berdasarkan aplikasi e-kinerja pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>

## Sasaran Kegiatan 1

### Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan ini BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan” melalui Sasaran Kegiatan BRPBATPP “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Dari kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok yang dibina sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok pelaku usaha / utama yang disuluh. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 4 (empat) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

## **Indikator Kinerja 1**

### **Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. Indikator kinerja ini merupakan komponen pembentuk bagi indikator kinerja Puslatluh KP sehingga capaian dari BRPBATPP mempengaruhi capaian dari Puslatluh KP.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh dan telah disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 3.800 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 460 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 1.500 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 2.500 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 3.800 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1)Data Kelompok Masyarakat KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satker, dilengkapi dengan link data dukung profil kelompok yang dilengkapi lampiran SK Penumbuhan dan atau Piagam Peningkatan Kelas Kelompok; dan (2)Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok) pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
2.287	3.960	2.735	3.800	2.500	2.668	106,72	-2,45	4.686	56,94

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok) adalah sejumlah 2.668 kelompok (106,72%) dari target 2.500 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan sebanyak 67 kelompok (-2,45%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan III dengan target pada Renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 56,94%.

Menurunnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh :

- (1) Masih terdapat Penyuluh Perikanan yang belum melakukan updating profil kelompok binaannya yang sesuai dengan pedoman penyusunan profil yang merupakan syarat untuk data dukung Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP
- (2) Masih terdapat profil kelompok binaan yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan belum sesuai dengan pedoman penyusunan profil, sehingga tidak dapat dijadikan data dukung untuk capaian Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 ini.

Capaian Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh ini berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari : (1) Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 288 kelompok, (2) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 2.028 kelompok, (3) Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 337

kelompok, (4) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berjumlah 8 kelompok dan (5) Kelompok Usaha Garam (Kugar) berjumlah 7 kelompok.

Capaian Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh ini berdasarkan keragaan kelas kelompoknya terdiri dari : (1) Kelompok Pemula berjumlah 2.089 kelompok, (2) Kelompok Madya berjumlah 571 kelompok, dan (3) Kelompok Utama berjumlah 8 kelompok.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP dapat melampaui target pada Triwulan III ini antara lain adalah :

1. Penyuluhan terhadap kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BRSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Kelompok pelaku utama / usaha yang disuluh telah melakukan penyusunan profil kelompok maupun updating data profil kelompok sebagai data dukung untuk indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

## **Indikator Kinerja 2**

### **Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)**

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan : (1)Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KepMen KP No. 14 tahun 2012

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau (2)Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, di periode triwulan yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 120 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 0 kelompok (tidak terdapat target), s/d Triwulan II sejumlah 10 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 40 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 120 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat kelasnya (ditambahkan kolom yang berisi Nomor Berita Acara Penilaian/ No. Sertifikat / No.Reg dan nilainya), atau data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan pembina; (2) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan, dan (3) Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok) pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	27	44	120	40	45	112,50	2,27	75	60,00

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok) adalah sejumlah 45 kelompok (112,50%) dari target 40 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebanyak 1 kelompok (2,27%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan III dengan target pada Renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 60,00%.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh: (1)Telah dilaksanakannya pemantauan rutin terhadap capaian kinerja penyuluh perikanan melalui pelaksanaan laporan mingguan, dan (2) Kelompok telah dilakukan penilaian pada Triwulan I, II, dan III dan telah mendapatkan Berita Acara Penilaian dengan skor sesuai dengan persyaratan kenaikan kelas, serta mendapatkan Sertifikat kenaikan kelas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Capaian Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP ini berdasarkan kenaikan kelasnya terdiri dari: (1) Kelas Pemula ke Madya sejumlah 42 kelompok, dan (2) Kelas Madya ke Utama sejumlah 3 kelompok.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok

binaannya yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya;

2. Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Peningkatan kelas kelompok berdasarkan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, meliputi beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Penguasaan teknologi;
2. Pengorganisasian;
3. Skala Usaha;
4. Kemampuan Permodalan;
5. Kemitraan/Kerjasama; dan
6. Akses informasi pasar

Berdasarkan tolok ukur tersebut, kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350.
2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650.
3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

Kegiatan penunjang dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain adalah kegiatan monitoring dan evaluasi internal BRPBATPP terhadap capaian Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan setiap target IKU organisasi dapat tercapai, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai

dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

### **Indikator Kinerja 3**

#### **Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 268 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 90 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 150 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 210 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 268 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan atau SK Pembentukan atau berisi register sertifikat pengukuhan dan nilainya) beserta nama penyuluh perikanan pembina (2) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan, dan (3) Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok) pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	168	386	268	210	299	142,38 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)	-22,54	150	199,33

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok) adalah sejumlah 299 kelompok (142,38% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku) dari target 210 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan sebanyak 87 kelompok (-22,54%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan III dengan target pada Renstra di tahun 2024, maka persentasenya adalah sebesar 199,33%.

Menurunnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh kurang lengkapnya atau tidak sesuai data dukung yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan yang sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Tahun 2023 sehingga tidak dapat dijadikan data dukung untuk capaian indikator kinerja pada Triwulan III ini.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari : (1) Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 40 kelompok, (2) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 219 kelompok, (3) Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 38 kelompok, dan (4) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berjumlah 2 kelompok .

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Pembentukan kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.
3. Fenomena bantuan pemerintah bagi kelompok aspirasi menjadi salah satu faktor pendukung dengan tumbuhnya kelompok-kelompok baru binaan Penyuluh.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

#### **Indikator Kinerja 4**

#### **Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BRPBATPP (orang)**

Pada indikator kinerja ini, tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRPBATPP diantaranya adalah : Penyuluh Perikanan Bantu, dan UMKM yang disuluh.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 889 orang. Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan.

Capaian indikator kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (Orang)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	889	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini belum terdapat target untuk Indikator Kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP. Demikian juga pada Triwulan III Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, tidak terdapat target untuk indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaian untuk indikator kinerja ini dengan target pada tahun 2024.

Capaian kinerja ini berasal dari rekap tenaga kerja yang terdiri dari: (1)Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dan (2)UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPBATPP.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain adalah:

- (1) Membuat rekap tenaga kerja Penyuluh Perikanan Bantu yang bersumber dari Surat Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2023, tanggal 3 Januari 2023.

Pada SK Kepala BRSDM tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PPB di wilayah kerja BRPBATPP adalah berjumlah 181 orang dengan rincian : (a) Propinsi Banten 29 Orang, (b) Propinsi DKI Jakarta 15 orang, dan (c) Propinsi Jawa Barat 137 orang. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini, terdapat 1 PPB yang mundur, 1 PPB yang meninggal dunia, serta 18 PPB yang diterima menjadi PPPK di lingkup KKP maupun luar KKP, sehingga jumlah PPB menjadi 161 orang.

(2) Membuat rekapan pelaku UMKM yang didampingi oleh penyuluh perikanan BRPBATPP. Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan rekap pelaku UMKM sejumlah 447 orang, namun karena terdapat perubahan data dukung pada Manual Indikator Kinerja yaitu penambahan data dukung berupa dokumentasi aktivitas masing-masing tenaga kerja dengan menggunakan geotagging, sehingga akan dilakukan pendataan ulang untuk data dukung Indikator Kinerja ini pada Triwulan IV.

Berdasarkan rekap jumlah tenaga kerja yang terlibat yang berasal dari Penyuluh Perikanan Bantu, serta pelaku UMKM yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan BRPBATPP, serta pengurangan jumlah PPS yang tidak menjadi data dukung untuk Indikator Kinerja ini, maka sampai dengan periode Triwulan III jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP adalah sejumlah 608 orang dengan catatan jumlah rekap ini belum dilakukan penambahan data dukung berupa dokumentasi aktivitas masing-masing tenaga kerja dengan menggunakan *geotagging*. Data dukung akan direkap kembali dan dilakukan updating pada Triwulan IV Tahun 2023.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

## **Sasaran Kegiatan 2**

### **Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

Pada sasaran kegiatan ini, BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yaitu “Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP” melalui sasaran kegiatan BRPBATPP “Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP”. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 1 (satu) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut :

## Indikator Kinerja 5

### **Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)**

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan dan Pedoman SFV.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja pada akhir tahun 2023 adalah sejumlah 5 kelompok masyarakat. Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Rekap data Pelaksanaan Percontohan di Satminkal, (2) Laporan Pelaksanaan Percontohan; dan (3) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok) pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	5	-	-	-	-	5	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini belum terdapat target untuk Indikator Kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok). Demikian juga pada Triwulan III Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, terdapat target untuk indikator kinerja ini sejumlah 5 produk pada tahun 2024.

Kegiatan percontohan penyuluhan dengan tema SMART Fisheries Village (SFV) merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dimana program SMART Fisheries Village mengusung prinsip keberlanjutan, modernisasi, akselerasi, regenerasi dan teknologi.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini terdapat 5 (lima) kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) dengan rincian sebagai berikut :

I. Percontohan Kegiatan Budidaya

a. Smart Fisheries Village (SFV) Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Tujuan kegiatan adalah :

1. Mewujudkan usaha perikanan dipedesaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan, modernisasi, akselerasi, regenerasi dan teknologi
2. Menggali dan mengembangkan potensi wilayah, dimana “Model Kampung Nila” sebagai salah satu cermin/bentuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di desa
3. Menwujudkan produk ikan yang berkualitas dan hasil perikanan yang unggul serta berdaya saing
4. Mendukung kemandirian pangan (ikan) yang berkelanjutan

Output yang telah dihasilkan sampai dengan bulan September sesuai dengan Peraturan Kepala BRSDM KP No. 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village antara lain adalah :

1. Kegiatan Pelatihan  
Sampai dengan bulan September, pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 3 pelatihan meliputi pelatihan minapadi, pelatihan pengolahan ikan, dan bimtek vaksinasi ikan dengan jumlah peserta yang dilatih adalah sejumlah 90 orang.
2. Kegiatan Penyuluhan  
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan berupa kegiatan pendampingan kepada kelompok binaan. Penyuluh yang terlibat pada kegiatan SFV Desa Kawali ini sejumlah 17 orang penyuluh perikanan dan 9 kelompok binaan.
3. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi  
Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dan capaiannya sampai dengan Triwulan III ini antara lain adalah:  
(a) Pendidikan (jumlah taruna yang praktek) sejumlah 26 orang (Poltek KP Pangandaran, Unpad, dan Unigaluh), (b) Penelitian (Jumlah kegiatan penelitian) sejumlah 1 orang (Poltek AUP), dan (c) Pengabdian Masyarakat (Jumlah kegiatan diseminasi teknologi) berjumlah 1 kegiatan (Sosialisasi CKIB).

Capaian kegiatan SFV Desa Kawali sampai dengan bulan September 2023 sesuai dengan dokumen kerjasama dengan Pemda Kab. Ciamis antara lain adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan vokasi KP : melibatkan 27 orang siswa pada kegiatan SFV (Poltek KP Pangandaran, UNPAD, UniGaluh, Poltek AUP)
2. Edukasi Perikanan : kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi SFV Desa dan Pengenalan Perikanan kepada generasi Muda : 4 sekolah (SD Negeri 1, 2 dan 3 Kawali, SMP Negeri 1 Kawali)
3. Pembinaan Bumdes/unit usaha dan pemasaran bumdes bidang perikanan : telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa
4. Pembinaan pendampingan pelaksanaan dan keberlanjutan program ketahanan pangan bersumber dari dana desa kepada Pemdes dan penerima bantuan : Penyusunan RKPDES Desa Kawali Tahun 2024 untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

5. Pendampingan TP PKK perihal derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga : Pembinaan 100 orang PKK Desa Kawali Oleh 3 Poklhasar untuk pemenuhan gizi keluarga melalui pelatihan keterampilan olahan ikan. Selain itu, Desa Kawali terpilih sebagai Juara 1 Kampung Mandiri tingkat Prov. Jawa Barat
6. Dilaksanakan Pelatihan mina padi dan mina sayur serta pendampingan mina padi dan mina sayur di lahan seluas 3000 m<sup>2</sup>
7. Menumbuhkan Kawasan Eduwisata SFV Kawali : Wisata pemancingan lembah ereng, wisata kuliner rumah makan kampung nila, pojok seblak kampung nila kawali, nila mart
8. Diversifikasi olahan produk perikanan : pelatihan diversifikasi olahan ikan sejumlah 45 orang, serta kegiatan pendampingan penerbitan PIRT, sertifikasi halal
9. Pengembangan budidaya ikan air tawar, berupa pelaksanaan pelatihan sejumlah 3 kegiatan, percontohan penyuluhan sejumlah 4 kegiatan, temu usaha sejumlah 1 kegiatan
10. Kelembagaan usaha pendukung SFV : terbentuknya Pokdakan sejumlah 3 kelompok, Poklhasar sejumlah 2 orang, dan Gapokkan sejumlah 1 orang
11. Digitalisasi Bisnis Perikanan, output yang dihasilkan antara lain :
  - a. Inisiasi pengembangan digitalisasi SFV Kawali Bersama BBRSEKP dan Dinas Kominfo Kab. Ciamis
  - b. Usaha Perikanan (Poklhasar) sudah menggunakan pembayaran Digital/Non Cash (QRIS)
  - c. Digitalisasi budidaya dengan menggunakan auto-feeder
  - d. Penghargaan Desa digital perikanan tingkat Provinsi Jawa Barat & mendapatkan bantuan 12 mesin *autofeeder*
12. Publikasi SFV : terbentuknya media sosial (a) IG : SFV.Kawali, (b)Tiktok : @sfv.kawali, dan (c)FB : SFV.Kawali
13. Literasi digital SFV desa : kegiatan yang dilaksanakan antara lain (a)Terbentuknya Galeri Informasi dan Pojok Baca di desa Kawali, (b)Kunjungan Duta Baca Indonesia Bapak Golagong ke SFV Kawali, (c)Dukungan buku-buku dari Perpustakaan KKP, Perpustakaan Desa, Balai Pustaka Kementan.

14. Telah terbentuknya Forum Lintas Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Pilot Project SFV di Desa Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis, dengan SK Bupati Ciamis No. 500.5.1/Kpts.421\_HUK/Tahun 2023

Berikut dokumentasi kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.



Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Triwulan III TA.2023



Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Triwulan III TA.2023 (Lanjutan)

## II. Percontohan Kelembagaan Sosek

### a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP

Tujuan kegiatan :

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan / pengembangan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi bisnis perikanan, dan manajemen usaha perikanan untuk mendukung program prioritas KKP dalam pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) dan Kampung Perikanan Budidaya (KPB),
- (2) Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan koperasi usaha perikanan di lokasi Kalaju dan KPB terpilih,
- (3) Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi bisnis perikanan di lokasi Kalaju dan KPB terpilih, dan
- (4) Memfasilitasi manajemen usaha perikanan di lokasi KALAJU dan KPB terpilih

Output yang dihasilkan antara lain adalah : (1) Tersedianya informasi kebutuhan pembentukan/pengembangan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi bisnis perikanan, dan manajemen usaha perikanan untuk mendukung program prioritas KKP dalam pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) dan Kampung Perikanan Budidaya (KPB), (2) Terfasilitasinya pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan koperasi usaha perikanan di lokasi KALAJU dan KPB terpilih, (3) Terfasilitasinya penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi bisnis perikanan di lokasi KALAJU dan KPB terpilih, dan (4) Terfasilitasinya manajemen usaha perikanan di lokasi KALAJU dan KPB terpilih.

Lokasi kegiatan ini berdasarkan SK Kepala BRSDM KP antara lain adalah : (1)Sedanu-Kepulauan Riau, (2)Samber Binyeri-Papua, (3)Mamburungan-Kalimantan Utara, (4)Samkai-Papua, (5)Sumberagung-Jawa Timur, (6)Rawa Makmur-Kalimantan Timur, (7)Kota Karang-Lampung, (8)Warloka Pesisir-Nusa Tenggara Barat, (9)Taman Ayu-Nusa Tenggara Barat, (10)Suak Gual-Bangka Belitung. Namun setelah dilakukan analisis terkait pemilihan lokasi untuk kegiatan di tahun 2023 ini, maka terpilih 2 (dua) lokasi untuk yaitu : (1)Samber Binyeri-Papua, dan (2)Kota Karang-Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 antara lain adalah:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan DJPT pada tanggal 5-6 Juli 2023 terkait kriteria penentuan lokasi Kalaju dan penyusunan instrumen untuk penilaian dan *need assessment* calon lokasi modelling KALAJU di dua lokasi yaitu KALAJU Desa Samber dan Binyeri (Biak Numfor) dan KALAJU Pulau Pasaran (Bandar Lampung).
- 2) Melakukan coaching KALAJU untuk mengidentifikasi rencana lokasi modeling Kalaju khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 Juli 2023. Rapat dipimpin oleh Kepala BBRSEKP, Penanggung Jawab Kegiatan KALAJU-KPB BBRSEKP dan Perwakilan dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP melaksanakan kajian penilaian awal program kampung nelayan maju dan kajian ini menjadi tolok ukur untuk pelaksanaan KALAJU.
- 3) Melaksanakan survei di lokasi modelling KALAJU di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung pada tanggal 17-21 Juli 2023 oleh Kepala Balai BBRSEKP dan tim KALAJU untuk melakukan penilaian rona awal KALAJU di Provinsi Lampung. Tujuannya untuk melakukan *assessment* penilaian lokasi KALAJU, mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi pelaku utama, identifikasi kebutuhan, permasalahan pengembangan usaha Perikanan dan penguatan kelembagaan Kampung Nelayan Maju di Pulau Pasaran Kota Karang Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil survei yang dilakukan oleh seluruh tim dengan mengkompilasi hasil survey dan data sekunder.

- 4) Melakukan koordinasi dengan DJPT, antara lain rapat konsolidasi hasil identifikasi rencana lokasi modelling Kalaju di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kaimana dan Kota Bandar Lampung tanggal 24 Juli 2023 di RR Nelayan GMB2. Rapat pembahasan modelling KALAJU dengan Menteri KP di GMB 1 serta rapat koordinasi persiapan perencanaan modelling KALAJU di Kabupaten Biak Numfor dan Kota Bandar Lampung tanggal 3 Agustus 2023 di RR Nelayan GMB. Acara ini diselenggarakan oleh DJPT dan dihadiri oleh Kepala BBRSEKP dan Tim KALAJU BBRSEKP.
- 5) Melaksanakan kunjungan lapang ke Kabupaten Biak Numfor Papua pada tanggal 7-11 Agustus 2023 dalam rangka membangun kelembagaan pengelolaan kampung nelayan maju dalam kegiatan Modelling, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di kampung nelayan maju (KALAJU).
- 6) Mengikuti rapat pembahasan dokumen perencanaan dan jadwal pelaksanaan *modelling* Kalaju di Desa Sumber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Kampung Namatota Kabupaten Kaimana dan Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung serta penyempurnaan draf paparan rencana Modelling KALAJU kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh DJPT pada tanggal 15 Agustus 2023 di RR Nelayan, GMB II KKP.

Berikut dokumentasi kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP.



Gambar 3.3. Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP



Gambar 3.3. Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP (Lanjutan)

b. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak)

Tujuan kegiatan : (1) Penilaian dampak sosial ekonomi proses bisnis *Smart Fisheries Village* pada lokasi terpilih, (2) Melaksanakan penguatan kelembagaan digitalisasi, korporasi dan promosi bisnis perikanan dan konservasi sesuai dengan tipologi lokasi terpilih, dan (3) Menyusun strategi keberlanjutan proses bisnis *Smart Fisheries Village* pada lokasi terpilih.

Output yang dihasilkan: (1) Kontribusi *Smart Fisheries Village* pada lokasi terpilih terhadap ekonomi lokal dan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, (2) Penguatan kelembagaan *Smart Fisheries Village* dalam kegiatan korporasi dan digitalisasi dalam rangka peningkatan produktivitas pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, dan (3) Implementasi sarana promosi, digitalisasi usaha kelautan dan perikanan serta pelayanan administrasi dalam kawasan *Smart Fisheries Villages*.

Lokasi kegiatan :

1. Desa Panembangan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Tema “SFV Mina Padi”. Strategi pelaksanaan kegiatan berupa Penilaian Outcome; Finalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan (Simpel Desa) dan bisnis perikanan (Agree Fisheries) dan Rancangan peraturan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan asset desa (fisik dan digital) yang telah dibangun; serta Sosialisasi konsep kelembagaan SFV.

2. Desa Sumberdodol, Kab. Magetan, Jawa Timur  
Tema “SFV Wisata dan Budidaya Ikan Koi”. Strategi pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan, digitalisasi dan sarana promosi;
3. Desa Patratani, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan  
Tema “SFV Konservasi”. Strategi pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan digitalisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 antara lain adalah :

- 1) Melakukan perbaikan KAK sesuai dengan format perbaikan serta pembuatan laporan tertulis untuk rona terkini dari kegiatan SFV Desa Panembangan (Kabupaten Banyumas) pada tanggal 10-12 Juli 2023, serta finalisasi KAK dan laporan rona awal SFV Koi Sumberdodol (Kabupaten Magetan) pada tanggal 3-5 Juli 2023.
- 2) Melakukan finalisasi penyusunan laporan rona awal SFV Patra Tani berdasarkan data sekunder serta penyusunan rencana trip pengumpulan data primer rona awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi rona awal aspek sosial ekonomi pada tanggal 10-12 Juli 2023.
- 3) Melaksanakan rapat digitalisasi SFV *brainstorming* kerjasama BBRSEKP dengan PT Aruna pada tanggal 17 Juli 2023. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BBRSEKP dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Aruna serta seluruh tim SFV. Tujuan dari rapat ini adalah *brainstorming* apa yang bisa dikerjasamakan dengan Aruna dalam proses digitalisasi SFV.
- 4) Melakukan bimbingan dengan mahasiwi dari Universitas Brawijaya yang melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) di BBRSEKP yang menjadikan SFV Desa Panembangan sebagai materi dalam pembahasan untuk kegiatan PKL Mahasiswi Universitas Brawijaya ini pada tanggal 27 Juli-31 Agustus 2023. SFV Panembangan ini dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.
- 5) Mengumpulkan data kegiatan pemasaran, diskusi dan konsultasi kesesuaian Sarpras pemasaran dan strategi perbaikan, evaluasi output SFV Sumberdodol serta menjajaki peluang kerjasama pengembangan

digitalisasi untuk SFV Sumberdodol dengan PT.Aruna melalui sosialisasi.

- 6) Melaksanakan survei dalam rangka pemetaan sosial ekonomi dan potensi perikanan terkait rona awal di SFV Desa Patra Tani pada tanggal 31 Juli-4 Agustus 2023 oleh tim. Hasil survey menunjukkan bahwa SFV Patra Tani memiliki potensi untuk pengembangan budidaya dan konservasi ikan lokal. Pada Bulan September SFV Patra Tani telah melakukan penyusunan draft proposal untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka bina lingkungan yang bertujuan untuk konservasi ikan endemik air tawar.
- 7) Tim SFV Desa Panembangan, SFV Desa Sumberdodol dan SFV Desa Patra Tani menghadiri Rapat Pembahasan Digitalisasi SFV Desa pada tanggal 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Utama Gedung BRSDMKP II Lantai 2 Ancol Jakarta. Rapat di pimpin Kepala BBRSEKP dan diikuti oleh Penanggung Jawab SFV Desa didampingi anggota SFV.
- 8) Menyusun proyeksi penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2023 dan merealisasikannya sesuai dengan rencana tersebut sebagai akselerasi kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan Percontohan SFV Kelembagaan dan Sosial Ekonomi TA. 2023.
- 9) Melakukan pemantauan secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan di SFV Desa Panembangan melalui sosial media dan berkomunikasi dengan koordinator penyuluh di Desa Panembangan pada tanggal 21-23 Agustus 2023. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (a) Poklhasr didampingi oleh penyuluh mengikuti dan melakukan praktek pelatihan pembuatan sempolan ikan secara daring yang dipandu langsung oleh pelatih dari BP3 Tegal pada tanggal 22 Agustus 2023; (b) Kunjungan *Outing Class* SD IT Cita Mulia (Edukasi tentang Mina Padi, menanam sayuran dan menangkap ikan) ke Svarga Mina Padi SFV Desa Panembangan pada tanggal 23 Agustus 2023; dan (c) Kunjungan *Cluster* Ikan Hias Langga Panembangan ke BRBIH Depok bersama *Cluster* Ikan Hias pada tanggal 23 Agustus 2023.
- 10) Melakukan kegiatan FGD terkait peluang pasar usaha budidaya ikan koi SFV Sumberdodol tanggal 25 September 2023 yang dilakukan secara *hybrid* dengan mengundang praktisi dari asosiasi pecinta koi Indonesia Bapak Sugiarto dan Kepala BRBIH Depok yang bertujuan untuk

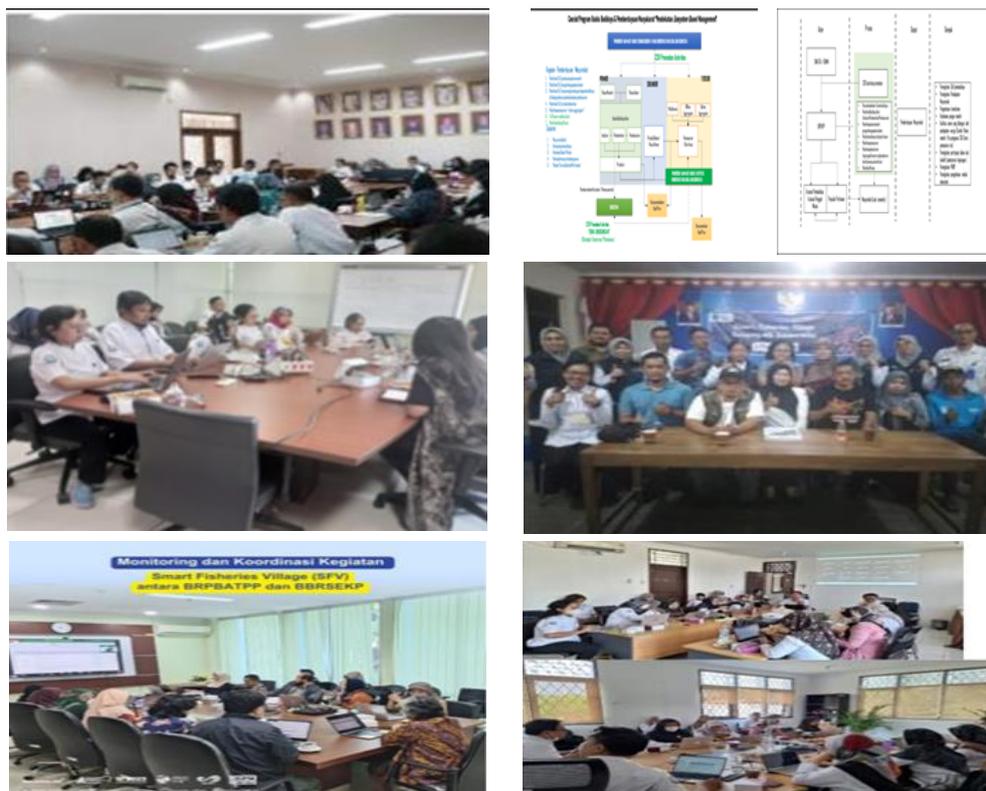
meningkatkan wawasan keragaan dan peluang usaha budidaya ikan koi dengan pelaku usaha ikan koi. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 melakukan workshop strategi pengelolaan kelembagaan SFV yang bertujuan untuk mempertemukan berbagai stakeholder dalam pengelolaan dan perencanaan kegiatan SFV Sumberdodol terkait pembahasan desain model kelembagaan yang paling sesuai. Serta melakukan sosialisasi bantuan pemerintah untuk ikan hias tanggal 31 September 2023 untuk memberikan informasi bagi pembudidaya Koi agar dapat mengakses bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan usahanya.

- 11) Melaksanakan kunjungan lapang ke SFV Sumberdodol dalam rangka peningkatan masyarakat untuk perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi dalam implementasi kegiatan SFV di Kampung Ikan Koi Desa Sumberdodol pada tanggal 29 Agustus-2 September 2023. Serta pemantauan melalui media sosial kegiatan yang dilakukan di SFV Desa Panembangan terkait panen ikan nila di Pokdakan Berkah Randu Alas Penyangga SFV Desa Panembangan pada tanggal 29 Agustus 2023.
- 12) Melaksanakan rapat Koordinasi Kegiatan SFV 2023 antara BRPBATPP dengan BBRSEKP secara Luring di BRSDMKP Gedung 2 Ancol pada tanggal 1 September 2023. Tujuan dari kegiatan ini agar BBRSEKP melakukan strategi terkait percepatan anggaran karena sampai dengan bulan Agustus realisasi penyerapan baru sekitar 25%. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 bertempat di Insatalasi Cibalagung Bogor dilakukan rapat lanjutan terkait kesepakatan anggaran yang direvisi dan komitmen untuk percepatan serapan anggaran.

Berikut dokumentasi kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak).



Gambar 3.4. Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak) pada Triwulan III TA.2023



Gambar 3.4. Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak) pada Triwulan III TA.2023 (lanjutan)

c. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut

Tujuan kegiatan : (1) Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan/penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi), (2) Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3) Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4) Memfasilitasi penguatan promosi usaha perikanan.

Output yang dihasilkan: (1) Tersedianya list kebutuhan pembentukan /penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi, (2) Terfasilitasinya pembentukan/penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3) Terfasilitasinya penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi bisnis untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4) Terfasilitasinya penguatan promosi usaha perikanan.

Lokasi Kegiatan :

1. Desa Poka, Kecamatan Talak Ambon, Kota Ambon, Maluku  
Tema : SFV Lobster
2. Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu  
Tema : SFV Gurita
3. Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan  
Tema : SFV Rumput Laut, Udang, Bandeng
4. Desa Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat  
Tema : SFV Eduwisata Pesisir Laut

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 antara lain adalah:

- 1) Melaksanakan pendampingan dan diskusi persiapan pembentukan BumDes yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Juli 2023 oleh tim SFV Desa Linau dari BBRSEKP. Acara ini dihadiri oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kaur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Kaur.
- 2) Melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan rona awal serta laporan mingguan dan bulanan, mendampingi dalam penyusunan AD ART untuk 2 Gapokkan (Depok Jaya dan Pesona JMP) yang sudah terbentuk bersama Puslatluh dan BPPP Ambon, melakukan disuksi untuk tindak lanjut inisiasi pendampingan digitalisasi SFV dengan sejumlah pihak (termasuk *Efishery*) dan menegaskan bahwa bentuk digitalisasi yang diperbolehkan adalah pendampingan bukan untuk pengadaan aplikasi, serta melakukan koordinasi secara intens melalui daring dengan BPPP Ambon, penyuluh perikanan dan sejumlah pembudidaya untuk pembentukan gapokkan (gabungan kelompok perikanan) untuk penyusunan struktur organisasi dan pengesahan dokumen Gapokkan oleh pemerintah desa yang dilakukan SFV Desa Poka pada Bulan Juli-Agustus 2023.

- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi BumDes kepada masyarakat Desa Linau Kabupaten Kaur, Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2023 secara *hybrid* oleh BRPPPUPP dan BBRSEKP. Acara ini dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat (LMD, karang taruna, PKK, Koperasi perikanan. KUB). Babinsa, Lanal AL, Dinas PMD, Dinas KP Kabupaten Kaur, Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, Sekdes).
- 4) Melaksanakan kegiatan finalisasi rona awal dan KAK berdasarkan data survey lapangan, membuat proses bisnis pengembangan kelembagaan dan digitalisasi serta melakukan diskusi dengan tim Pusat Riset Kelautan terkait perencanaan kegiatan serta koordinasi dengan Wali Nagari dan penyuluh oleh tim SFV Nagari Parit pada Bulan Juli 2023.
- 5) Melaksanakan survey terkait rona awal, pembentukan koperasi serba usaha perikanan “Cerdas Ajakkang”, pembentukan rumah probiotik, penandatanganan nota kesepahaman antara BRSDMKP dengan mitra terkait peningkatan kapasitas SDMKP dalam SFV Desa Ajakkang, bimbingan dan konsultasi budidaya udang vanname kelompok mitra bahari dan pelatihan pembuatan probiotik RICA pada Bulan Juli 2023.
- 6) Menghadiri rapat akselerasi SFV Desa Linau, Kabupaten Kaur, Bengkulu yang dipimpin oleh Kapuslatluh dan dihadiri oleh semua elemen yang terlibat dalam kegiatan SFV Desa Linau (Puslatluh, BRPPUPP, BBRP2BKP, BBRSEKP, BP3 Banyuwangi, Penyuluh Perikanan Provinsi Bengkulu, Camat Maje dan Perangkat Desa Linau) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Agustus 2023 secara daring.
- 7) Melaksanakan kegiatan diskusi menyusun KAK pendampingan digitalisasi pengembangan usaha perikanan di SFV Desa Linau pada tanggal 18 Agustus 2023. Target/sasaran dari pendampingan ini meliputi inisiasi digitalisasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan pendokumentasian usaha dan kegiatan pelaku usaha perikanan digital.
- 8) Tim SFV Desa Ajakkang, SFV Desa Nagari Parit, SFV Desa Poka dan SFV Desa Linau menghadiri Rapat Pembahasan Digitalisasi SFV Desa pada tanggal 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Utama Gedung BRSDMKP II Lantai 2 Ancol Jakarta. Rapat di pimpin Kepala BBRSEKP dan diikuti oleh Penanggung Jawab SFV Desa didampingi anggota SFV.

- 9) Melaksanakan kunjungan lapang ke SFV Desa Ranah Koto oleh tim pada tanggal 20-24 Agustus 2023 dalam rangka pembentukan dan pengembangan kelembagaan wisata bahari serta melaksanakan diskusi kelompok terpumpun dengan tema pembentukan dan pengembangan kelembagaan wisata bahari di Desa Ranah Koto Tinggi Pasaman Barat bersama Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di damping Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (PMN) Kabupaten Pasaman Barat.
- 10) Melakukan pemantauan secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan di SFV Poka melalui sosial media SFV Desa Poka dan berkomunikasi dengan penyuluh di Desa Poka terkait kegiatan penyerahan dan penebaran bibit ikan kuwe (Bobara) kepada 20 pokdakan di kawasan SFV Poka sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama usaha pembesaran ikan pada KJA antara BPPP Ambon dan BumDesa Gemilang Desa Poka pada tanggal 25 Agustus 2023.
- 11) Melaksanakan kunjungan lapang ke SFV Desa Linau oleh tim pada tanggal 28-31 Agustus 2023 dalam rangka pendampingan pembentukan/penguatan kelembagaan serta kebutuhan SFV Desa Linau dan mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan tema Inisiasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait Konservasi Gurita dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Perwakilan Yayasan Akar, Kepala dan Sekretaris Desa Linau, Pengurus Koperasi Perikanan, Perwakilan KUB Gurita Kabupaten Kaur, Perwakilan Poklahsar, Perwakilan Pokmaswas dan Perwakilan Penyuluhan Perikanan.
- 12) Menghadiri rapat perkembangan SFV Desa dan rencana kegiatan SFV Desa bulan September-Desember Tahun 2023 dari masing-masing Satminkal Penyuluhan secara Daring pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh tim SFV Desa Ajakkang, SFV Desa Nagari Parit dan SFV Desa Poka.
- 13) Dilaksanakannya rapat Koordinasi Kegiatan SFV 2023 antara BRPBATPP dengan BBRSEKP secara Luring di BRSDMKP Gedung 2 Ancol pada tanggal 1 September 2023. Tujuan dari kegiatan ini agar BBRSEKP melakukan strategi terkait percepatan anggaran karena sampai dengan bulan Agustus realisasi penyerapan baru sekitar 25%. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 bertempat di Insatalasi Cibalagung Bogor dilakukan rapat lanjutan terkait kesepakatan anggaran yang direvisi dan

komitmen untuk percepatan serapan anggaran agar kegiatan output SFV dapat tercapai.

- 14) Dilaksanakannya pendampingan kelembagaan untuk inisiasi pembentukan koperasi SFV Desa Poka oleh BBRSEKP dan PUSLATLUH KP pada tanggal 25-28 September 2023. Serta pendampingan peningkatan kemampuan digitalisasi masyarakat Desa Poka yang bermitra dengan Aruna (bulan Oktober-November) dan pendampingan untuk inisiasi terkait peran dan fungsi koperasi perikanan dengan komoditas unggulan ikan kuwe (bobara) dan lobster di KJA oleh BBRSEKP. Pada tanggal Bulan September 2023 juga dilakukan pendampingan akses, literasi dan pemanfaatan teknologi digital desa dengan tim LUVTrip dan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen pariwisata dan bimtek manajemen pariwisata, pembentukan branding dan pengembangan kapasitas promosi melalui media sosial oleh SFV Ranah Koto Tinggi, serta melaksanakan kegiatan penentuan vendor terkait digitalisasi, persiapan inisiasi digitalisasi dan pembuatan program kerja kelompok pengiat pariwisata di SFV Ranah Koto Tinggi dengan melibatkan kelompok (Pokdarwis, Pokmaswas, KPPS, Luvtrip, Wali Nagari).

Berikut dokumentasi kegiatan SFV Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut.



Gambar 3.5. Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut pada Triwulan III TA.2023



Gambar 3.5. Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut pada Triwulan III TA.2023 (Lanjutan)

d. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Tawar

Tujuan: (1)Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan /penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi), (2)Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3)Memfasilitasi perikanan, dan (4)Memfasilitasi penguatan promosi usaha perikanan.

Output yang dihasilkan : (1)Tersedianya list kebutuhan pembentukan / penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi), (2)Terfasilitasinya pembentukan/penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3)Terfasilitasinya penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi bisnis untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4)Terfasilitasinya penguatan promosi usaha perikanan.

Program SFV Perikanan Darat yang dicanangkan oleh BRSDM, dengan fokus kegiatan penguatan kelembagaan, fasilitasi digitalisasi dan sarana promosi. Adapun lokasi SFV Perikanan Darat yang adalah:

1. Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah  
Tema : SFV Nila
2. Desa Kendalbulur, Kec.Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur
3. Desa Sungai Dua, Kec.Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  
Tema : SFV Patin

4. Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat  
Tema : SFV Ikan Nilem

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 antara lain:

- 1) Penyusunan KAK dan laporan rona awal SFV Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3-5 Juli 2023 serta pembuatan laporan rona awal SFV Mangunegara pada tanggal; 10-12 Juli 2023.
- 2) Melakukan identifikasi permasalahan kelembagaan pemerintah Desa Sungai Dua pada Bulan Juli 2023 dari indikator sumberdaya aparatur desa, BumDes, dan koperasi. Selanjutnya melakukan estimasi capaian SFV Desa dengan melihat indikator kondisi masyarakat, komoditas, kelembagaan dan digitalisasi.
- 3) Penghitungan indeks tingkat literasi digital di Desa Kendalbulur berdasarkan *digital ethics*, *digital safety* dan *digital culture* pada tanggal 14 Juli 2023 oleh tim. Keempat pilar diatas menjadi salah satu basis dalam pengembangan program literasi digital desa.
- 4) Melaksanakan rapat digitalisasi SFV *brainstorming* kerjasama BBRSEKP dengan PT Aruna pada tanggal 17 Juli 2023. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BBRSEKP dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Aruna serta seluruh tim SFV. Tujuan dari rapat ini adalah *brainstorming* apa yang bisa dikerjasamakan dengan Aruna dalam proses digitalisasi SFV.
- 5) Melakukan pemantauan secara tidak langsung melalui media sosial kegiatan yang dilakukan di SFV Desa Mangunegara pada tanggal 18-23 Agustus 2023 oleh tim. Kegiatan yang dipantau antara lain (a) Penyuluh Perikanan Purbalingga bersama DKPP Purbalingga mendampingi BKIPM Semarang melakukan pengambilan sampel dan identifikasi penyakit ikan, serta pengukuran kualitas air di kluster Budidaya Ikan Secara Intensif dan kluster Pembenihan SFV Mangunegara; dan (b) Penyuluh Perikanan Purbalingga mendampingi Poklahsar SFV Mangunegara mengikuti Pelatihan Pembuatan Sempol Ikan secara daring yang diselenggarakan oleh BPPP Tegal, di Rumah Produksi Poklahsar Desa Mangunegara.
- 6) Tim SFV Desa Mangunegara, SFV Desa Tanah Bumbu, SFV Desa Kawali dan SFV Desa Kendal Bulur menghadiri Rapat Pembahasan Digitalisasi SFV Desa pada tanggal 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Utama Gedung BRSDMKP II Lantai 2 Ancol Jakarta. Rapat di pimpin

Kepala BBRSEKP dan diikuti oleh Penanggung Jawab SFV Desa didampingi anggota SFV.

- 7) Membuat KAK pendampingan digitalisasi pengembangan usaha perikanan di SFV Desa Kawali dan SFV Desa Kendalbulur pada tanggal 21-23 Agustus 2023 dan di SFV Sungai Dua pada tanggal 18 Agustus 2023. Ruang lingkup kegiatan dari pendampingan ini meliputi inisiasi digitalisasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan pendokumentasian usaha dan kegiatan pelaku usaha perikanan digital. Serta dilakukannya kegiatan pembentukan lembaga ekonomi pada tanggal 27 September-2 Oktober 2023 untuk mengadakan fasilitas rintisan lembaga ekonomi untuk keberlanjutan usaha perikanan dan penyusunan rancangan prospectus unit bisnis lembaga ekonomi di Desa Kendalbulur.
- 8) Melakukan pemantauan secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan di SFV Desa Kawali melalui social media SFV Desa Kawali dan berkomunikasi dengan koordinator penyuluh di Desa Kawali. Kegiatan yang dilakukan di SFV Desa Kawali terkait pelaksanaan Soft opening Launching Fish Market Day dan peresmian pojok galeri informasi desa dan SFV Desa Kawali yang dihadiri Bupati Ciamis, Camat Kawali, Sekda Kawali, Kepala Desa Kawali, Penyuluh Perikanan dan Masyarakat Desa Kawali pada tanggal 28 Agustus 2023. Serta pemantauan secara tidak langsung melalui media sosial di SFV Tanah Bumbu dan berkoordinasi dengan koordinator penyuluh di Desa Tanah Bumbu terkait pengambilan dan pemeriksaan sampel kualitas air dan ikan di lokasi SFV Sungai Dua oleh UPTD PBKL (Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan) Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023.
- 9) Melaksanakan rapat internal oleh tim SFV Kendalbulur dalam rangka rencana penentuan segmen bisnis untuk kegiatan SFV Kendalbulur pada tanggal 29 Agustus 2023. Serta menghadiri rapat perkembangan SFV Desa dan rencana kegiatan SFV Desa bulan September–Desember Tahun 2023 dari masing-masing Satminkal Penyuluhan secara daring pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh tim SFV Desa Kendalbulur, SFV Desa Mangunegara, SFV Tanah Bumbu dan SFV Desa Kawali.
- 10) Dilaksanakannya rapat koordinasi kegiatan SFV 2023 antara BRPBATPP dengan BBRSEKP secara luring di BRSDMKP Gedung 2 Ancol pada tanggal 1 September 2023. Tujuan dari kegiatan ini agar BBRSEKP melakukan strategi terkait percepatan anggaran karena sampai dengan

bulan Agustus realisasi penyerapan baru sekitar 25%. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 bertempat di Instalasi Cibalagung Bogor dilakukan rapat lanjutan terkait kesepakatan anggaran yang direvisi dan komitmen untuk percepatan serapan anggaran agar kegiatan output SFV dapat tercapai.

- 11) Mengikuti kegiatan Rakor pemantauan capaian dan progres pelaksanaan kegiatan SFV BPPSDMKP semester I serta Rencana Aksi Pelaksanaan kegiatan Semester II Tahun 2023 pada tanggal 13-15 September 2023 secara *Hybrid* di Bogor oleh seluruh anggota tim SFV. Agenda kegiatan terkait dengan internalisasi dan pendalaman Perkabadan tentang SFV, strategi pencapaian target PNBPN melalui percepatan Maksimal Penggunaan (MP) Tahap II serta dukungan terhadap program prioritas KKP Kalaju melalui Bale Pelatihan SFV.
- 12) Dilakukannya pendampingan kelembagaan terkait usaha perikanan untuk mendukung SFV Desa Sungai Dua pada tanggal 26-30 September 2023. Selain itu, telah dilaksanakannya kegiatan korporasi dan digitalisasi dengan pihak vendor di Yogyakarta oleh SFV Kawali pada tanggal 21-23 September 2023 dengan tujuan agar tercapai peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku usaha perikanan sehingga diharapkan outcome seperti: meningkatnya jumlah penjualan produk perikanan serta dilaksanakannya studi banding digitalisasi di kelompok Mina Sumberembe dalam rangka studi banding digitalisasi Kampung Mina Padi Sumberembe untuk kemudian diadopsi di SFV Kawali. Selain itu telah dilaksanakannya kegiatan penguatan kelembagaan Gapokkan antara tim BBRSEKP dengan pengurus dan anggota Gapokkan di SFV Kawali, yang terdiri dari tiga tujuan yaitu sosial, ekonomi dan produktivitas. Kemudian dilakukan penguatan lembaga BumDes yang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Berikut dokumentasi kegiatan SFV Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Tawar.



Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan SFV Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Tawar pada Triwulan III TA.2023

### **Sasaran Kegiatan 3**

#### **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Pada sasaran kegiatan ini, BRPBATPP berperan serta dalam mendukung sasaran kegiatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yaitu “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” melalui sasaran kegiatan BRPBATPP “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 1 (satu) indikator kinerja yang mendukungnya, yaitu sebagai berikut :

## Indikator Kinerja 6

### Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar di Satminkal BRPBATPP (Unit)

Merupakan indikator kinerja dengan definisi peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru di tahun 2023. Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan cara menghitung jumlah sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 1 (satu) unit.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah : 1. Rekap data kegiatan pengadaan Modal Lingkup BRPBATPP, 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan, dan 3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (Unit) pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar di Satminkal BRPBATPP (Unit)									
Realisasi TW III 2020-2021			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini belum terdapat target serta capaian untuk Indikator Kinerja Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar di Satminkal BRPBATPP (Unit). Demikian juga pada Triwulan III Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian

kinerja pada Triwulan III tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, tidak terdapat target untuk indikator kinerja ini.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar di Satminkal BRPBATPP (Unit) belum terdapat target pada Triwulan III ini sehingga persentase capaian belum ada.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 ini. Anggaran dari indikator kinerja ini adalah berasal dari pemanfaatan PNPB. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 1 unit. Realisasi belanja modal beserta anggarannya sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Progres Belanja Modal Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP di Satminkal BRPBATPP Triwulan III TA.2023

NO.	RINCIAN BELANJA MODAL	VOLUME	HARGA (Rp.)	TOTAL ANGGARAN	REALISASI S/D TW III
<b>A.</b>	<b>Sarana dan Prasarana SFV Bogor</b>			<b>101.054.000</b>	<b>60.522.000</b>
<b>532111</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
1	Mesin Potong Rumput	4 Unit	5.150.000	20.600.000	20.600.000
2	Pompa Alkon 3 inch	2 Unit	4.703.000	9.406.000	9.406.000
3	Blower	2 Unit	4.760.000	9.520.000	9.520.000
4	Pompa Air	2 Unit	3.198.000	6.396.000	6.396.000
5	Kincir Air	2 Unit	7.300.000	14.600.000	14.600.000
6	Drone Camera	2 Unit	14.725.000	29.450.000	-
7	Proyektor	1 Unit	6.382.000	6.382.000	-
8	LED TV	1 Unit	4.700.000	4.700.000	-
<b>B.</b>	<b>Sarana dan Prasarana SFV Depok</b>			<b>109.865.000</b>	<b>47.979.750</b>
<b>532111</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
1	Genset Inverter	2 Unit	13.000.000	26.000.000	-
2	Bak Fiber	2 Unit	8.880.000	17.760.000	17.760.000
3	Blower Supercharge 1 PK	3 Unit	8.811.000	26.433.000	-
4	Pompa submersible	7 Unit	1.350.000	9.450.000	-
5	Mesin Potong Rumput	1 Unit	5.190.000	5.190.000	5.189.250
6	Chain Saw	1 Unit	4.941.000	4.941.000	4.939.500

NO.	RINCIAN BELANJA MODAL	VOLUME	HARGA (Rp.)	TOTAL ANGGARAN	REALISASI S/D TW III
534121	<b>Belanja Modal Irigasi</b>				
1	Sumur bor	1 Unit	20.091.000	20.091.000	20.091.000
<b>C.</b>	<b>Sarana dan Prasarana SFV Sukamandi</b>			<b>110.697.000</b>	<b>42.975.100</b>
532111	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
1	Blower Supercharge 3 PK	2 Unit	21.500.000	43.000.000	42.975.100
2	Pompa Air Elektrik 3	4 Unit	5.499.000	21.996.000	-
3	Mesin Potong Rumput	6 Unit	5.300.000	31.800.000	-
4	Speaker Indoor	1 Unit	13.901.000	13.901.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>321.616.000</b>	<b>151.476.850</b>

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada Triwulan III ini telah terealisasi beberapa sarana pelatihan dan penyuluhan KP berupa belanja modal berupa belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal irigasi dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp.151.476.850 (47,10%).

Kegiatan penunjang untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, serta kegiatan monev oleh Puslatluh KP maupun Sekretariat BRSDM KP.

#### **Sasaran Kegiatan 4**

#### **Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

Pada sasaran kegiatan ini, BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas” melalui Sasaran Kegiatan BRPBATPP “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai PNBP, meminimalisir nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP, meningkatkan profesionalitas ASN BRPBATPP, meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja BRPBATPP, meningkatkan nilai

PM SAKIP, menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP, menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BRPBATPP khususnya dan lingkup KKP umumnya dengan berperan serta aktif menginformasikan kegiatan BRPBATPP melalui aplikasi [kinerjakkp.bitrix24.com](https://kinerjakkp.bitrix24.com) dan *collaboration office*, meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BRPBATPP, meningkatkan nilai kinerja anggaran BRPBATPP, serta melakukan kegiatan layanan Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP.

Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

## **Indikator Kinerja 7**

### **Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)**

Definisi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

- Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum dari PNBP adalah :
  - 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
  - 2) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
  - 3) PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 4) PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - 6) PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
  - 7) PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung Nilai PNBP SDA ditambah Nilai PNBP lainnya. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan.

Target sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 0,092 Rupiah Milyar. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, s/d Triwulan II sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, s/d Triwulan III sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, dan s/d Triwulan IV sejumlah 0,092 Rupiah Milyar.

Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dari Kepala Satker ke Pusat.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai PNBP BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Milyar)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	0,092	0,092	0,229 (0,23 pada aplikasi kinerjaku)	249,50 atau 120 (pada aplikasi kinerjaku)	-	-	-

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Nilai PNBP BRPBATPP adalah sejumlah 0,229 Rupiah Milyar (pembulatan ke atas pada aplikasi kinerjaku menjadi 0,23 Rupiah Milyar) (249,50% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku) dari target 0,092 Rupiah Milyar. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan Triwulan III tahun 2022.

Nilai PNBP BRPBATPP pada tahun 2023 ini berasal dari penerimaan fungsional dan umum dari beberapa akun sebagai berikut :

Tabel 3.10. Akun Penerimaan PNBP Fungsional dan Umum BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

No.	Kode Akun	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Penerimaan PNBP Fungsional</b>	
1	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
2	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
3	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
4	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
<b>II.</b>	<b>Penerimaan PNBP Umum</b>	
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Sedangkan untuk capaian PNBP BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Penerimaan PNBP BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

No.	Bulan	Jenis Penerimaan PNBP		
		Fungsional	Umum	Jumlah
1	Januari	30.350.000	9.752.803	40.102.803
2	Februari	4.260.940	883.002	5.143.942
3	Maret	6.815.625	127.886.535	134.702.160
4	April	-	882.535	882.535
5	Mei	11.018.400	882.535	11.900.935
6	Juni	13.382.130	882.535	14.264.665
7	Juli	7.589.210	882.535	8.471.745
8	Agustus	2.880.000	882.535	3.762.535
9	September	9.261.650	882.535	10.144.185
	<b>Total</b>	<b>85.557.955</b>	<b>143.817.550</b>	<b>229.375.505</b>

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Nilai PNBP BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Terdapat akun baru pada penerimaan PNBP fungsional yang berasal dari Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual yang merupakan pembayaran atas penjualan vaksin yang diproduksi oleh PT. Caprifarmindo Laboratories sesuai dengan Perjanjian Lisensi yang ditandatangani oleh pihak BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories serta Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi;
2. Terdapat akun baru pada penerimaan PNBP umum yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, yaitu berupa hasil penjualan mobil melalui lelang yang dilaksanakan secara terbuka melalui situs website lelang.go.id. yang merupakan milik Kemenkeu.

Kegiatan dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, memasukkan indikator kinerja ini ke dalam SKP pegawai terkait pelaporan nilai PNBP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan dukungan manajerial.

## **Indikator Kinerja 8**

### **Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)**

Indikator kinerja ini merupakan nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2022 (*audited*) tidak melebihi  $\leq 0,5\%$  dari total realisasi anggaran BRPBATPP Tahun 2022.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sebesar  $\leq 0,5\%$ . Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BRSDM KP

Capaian indikator kinerja Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022 pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	0,5	-	-	-	-	1	-

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini belum terdapat target serta capaian untuk Indikator Kinerja Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022. Demikian juga pada Triwulan III Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, terdapat target untuk indikator kinerja ini sebesar 1% pada tahun 2024.

Kegiatan penunjang untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta kegiatan monev oleh Pusrisikan maupun Sekretariat BRSDM KP.

## Indikator Kinerja 9

### Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)

Definisi dari indikator kinerja ini meliputi :

- (1) Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
- (2) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018
- (3) Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan cara menghitung indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 (empat) dimensi. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja; dan (4). Disiplin.

1. **Kualifikasi** : Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), nilai kualifikasi= 25;
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua), nilai kualifikasi= 20;
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), nilai kualifikasi= 15;
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), nilai kualifikasi= 10;
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, nilai kualifikasi= 5; dan
  - f. Pendidikan di bawah SLTA, nilai kualifikasi= 1.
2. **Kompetensi** : Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.13. Nama Kompetensi dan Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22.5</b>
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17.5</b>
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

3. **Kinerja** : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.14. Nilai Kinerja Berdasarkan Nilai SKP

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke bawah	1

4. **Disiplin** : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.15. Nilai Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin	5
R	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Tabel 3.16. Kategori ASN Berdasarkan Nilai IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional / sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional / tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional / sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional / rendah
≤ 60	Sangat tidak profesional / sangat rendah

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah per semester. Target IP ASN sampai dengan akhir tahun 2023 adalah telah ditetapkan sebesar 78. Sedangkan target per semester yaitu : (1) Semester 1 target 70, dan (2) Semester 2 target 78.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Data tingkat pendidikan (diambil dari data dasar pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
2. Data Kompetensi (diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
3. Data SKP (diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP);
4. Data hukuman disiplin (diambil dari data riwayat hukuman disiplin pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
5. Screenshot nilai IP ASN pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/>

Capaian Indikator Kinerja (IK) Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	78	-	-	-	-	76	97,03

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP tidak terdapat target pada Triwulan III karena target indikator kinerja adalah per semester, sehingga persentase capaian akan ada pada Semester II. Sampai dengan akhir Triwulan III, capaian IP ASN BRPBATPP yang tertera pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/> adalah sebesar 83,06 (kategori tinggi) yang dapat dilihat pada screenshot IP ASN per 30 September 2023 sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR	194	20.39	81.56 %	32.96	82.4 %	24.72	82.4 %	5	100 %	83.06	TINGGI

Gambar 3.7. Nilai IP ASN BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/>

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai IP ASN bagi pegawai lingkup BRPBATPP, yaitu antara lain adalah :

1. Melakukan monitoring dari bagian kepegawaian terkait nilai IP ASN pegawai lingkup BRPBATPP serta menyampaikan hasil evaluasi melalui memo.
2. Menghimbau kepada seluruh pegawai BRPBATPP baik melalui memo maupun media sosial (WA grup balai) serta pada kegiatan apel pagi untuk dapat mengikuti diklat/pelatihan/seminar dan sebagainya untuk dapat meningkatkan nilai IP ASN individu.

- Menghimbau kepada seluruh pegawai BRPBATPP baik melalui memo maupun media sosial (WA grup Balai) serta pada kegiatan apel pagi untuk dapat mengupload sertifikat dari kegiatan diklat/pelatihan/seminar yang telah diikuti.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP masing-masing pegawai lingkup BRPBATPP.

## **Indikator Kinerja 10**

### **Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)**

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Nilai PM SAKIP Level III BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP BRPBATPP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BRPBATPP.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM. Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18. Kategori Nilai SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 80,5. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah : (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen dan atau, (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai PM SAKIP BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 10 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	80,5	-	-	-	-	-	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai PM SAKIP BRPBATPP tidak terdapat target pada Triwulan III karena target indikator kinerja adalah tahunan, sehingga persentase capaian belum ada. Demikian juga dengan capaian tahun sebelumnya pada Triwulan III juga tidak ada karena indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru pada tahun 2023 ini.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Nilai PM SAKIP BRPBATPP, yaitu antara lain adalah :

1. Melakukan updating serta mengunggah dokumen SAKIP pada <https://esr.menpan.go.id>;
2. Mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Implementasi SAKIP lingkup BRSDM KP Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Sekretariat BRSDM KP secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan luring di Hotel Mirah Bogor pada tanggal 12-14 April 2023;
3. Melengkapi dokumen SAKIP yang diperlukan untuk melakukan penilaian mandiri SAKIP lingkup BRPBATPP.
4. Mengikuti kegiatan “Koordinasi dan *Benchmarking* Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BRSDM TA 2023” pada tanggal 5–8 Juni 2023 di BRPPUPP Palembang, Sumatera Selatan.

Kegiatan dihadiri oleh 9 Satker yang terdiri dari 7 Satker dibawah Pusat Riset Perikanan (BRPPUPP Palembang, BBRBLPP Gondol, BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor, LRMPHP Bantul, LRBRL Gorontalo, dan LRPT Denpasar), dan 2 Satker dibawah Pusat Riset Kelautan (LRSDKP Bungus, dan LPTK Wakatobi).

Pada kegiatan ini telah dihasilkan output berupa Berita Acara Penilaian Mandiri dan Verifikasi Bukti Dukung SAKIP BRPBATPP Tahun 2023 tertanggal 8 Juni 2023 serta ditandatangani oleh tim evaluasi SAKIP BRSDM KP, penanggung jawab Satker dan diketahui oleh tim evaluasi SAKIP Pusrisikan.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain dengan melengkapi data dukung SAKIP, melakukan monitoring terhadap capaian kinerja balai, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan kegiatan pengukuran mandiri SAKIP.

## **Indikator Kinerja 1 1**

### **Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)**

Rekonsiliasi kinerja BRPBATPP adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup BRPBATPP. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BRPBATPP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja yang dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu :

1. **Aspek Kepatuhan (bobot 25%)**, yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja:  
(a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja ; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e ) Data Dukung Laporan Kinerja.
2. **Aspek Kesesuaian (bobot 25%)**, yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku:
  - a. Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku).
  - b. Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)

- c. Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerja).
- Aspek Ketercapaian (bobot 30%)**, diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerja.
  - Aspek Ketepatan (bobot 20%)**, diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (25% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (25% x Nilai Aspek Kesesuaian) + (30% x Nilai Aspek Ketercapaian) + (20% x Nilai Aspek Ketepatan).

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 92. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah surat penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BRSDM KP dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Satker.

Capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 11 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	92	-	-	-	-	80	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan III ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Dalam rangka untuk mencapai Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP, maka beberapa hal yang telah dilaksanakan pada Triwulan III ini antara lain adalah :

- Melengkapi dokumen pada Triwulan III yang diperlukan pada aspek kepatuhan, yaitu : (a) Perjanjian Kinerja per Januari dan revisi; (b) Manual Indikator Kinerja

- per Januari dan revisi; (c) Rincian Target Indikator per Januari dan revisi; (d) Laporan Kinerja Triwulan I, II dan III; (e ) Data Dukung Laporan Kinerja pada Triwulan I, II dan III;
2. Melakukan pengecekan terkait kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja pada Triwulan I, II dan III;
  3. Melengkapi data dukung terkait capaian kinerja sehingga antara target dan realiasi dapat tercapai atau melebihi target yang berpengaruh pada capaian skor kinerja.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja.

## **Indikator Kinerja 12**

### **Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)**

Definisi dari indikator kinerja ini adalah sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Formula perhitungan Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II Tahun 2023 menggunakan aplikasi [kinerjakkp.bitrix24.com](http://kinerjakkp.bitrix24.com).

- Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu komponen dokumen dan komponen keaktifan,
- Dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24.
- Komponen dokumen yang diunggah pada aplikasi bitrix24 diantaranya Laporan Kinerja per triwulan.
- Bobot komponen keaktifan diantaranya :

- a. Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- b. Konten berupa karya infografis poin 1, dan
- c. Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BRSDM pada Triwulan III dan IV Tahun 2023 diantaranya :

- a. Menggunakan Aplikasi (collaboration office) dengan alamat portal.kkp.go.id,
- b. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan 4 poin, dan
- c. Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II.

Cara Mengukur TW I dan TW II :

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (britrix),
- b. Menilai dua Komponen Dokumen (20%), dan Komponen Keaktifan(80%),
- c. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (Kepala UPT Lingkup BRSDM)

**TWI dan TW II MP Unit Level 3 = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan**

Hasil capaian pada TW II merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II.

Cara Mengukur TW III dan IV :

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan dengan (collaboration office) portal.kkp.go.id
2. Nilai Maksimal Komponen Keaktifan 4 poin
3. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (Kepala UPT Lingkup BRSDM)

**TW III dan TW IV MP Unit Level 3 = Nilai Keaktifan / Target \* 100%**

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah 92%. Sedangkan target triwulanan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sebesar 92%, Triwulan II sebesar 92%, Triwulan III adalah sebesar 92%, dan Triwulan IV sebesar 92%.

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini adalah Surat Dinas dari Pusat Riset Perikanan, perihal penyampaian Capaian Nilai MP lingkup UPT Pusat Riset Perikanan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 12 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022	92	92	133,33	144,93 atau 120,00 (pada aplikasi kinerja ku)	33,33	84	158,73

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP adalah sebesar 133,33% (144,93% atau 120,00% (pada aplikasi kinerja ku)) dari target 92%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami peningkatan nilai sebesar 33,33 (33,33%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan III dengan target pada renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 158,73%.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh: (1)Keaktifan dari Kepala BRPBATPP pada aplikasi *Collaboration Office*, dan (2)Terdapat perubahan formula perhitungan dari indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP yang memperbolehkan capaian indikator kinerja ini lebih dari 100,00%.

Capaian indikator kinerja tersebut disampaikan oleh Pusat Riset Perikanan melalui surat dinas No.B.2401/BRSDM.3/RC.610/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal “Perubahan Capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2023”. Berdasarkan

surat tersebut, BRPBATPP telah mencapai persentase MP pada Triwulan III sebesar 133,33%.

Beberapa komponen yang menjadi pendukung tercapainya target indikator kinerja ini dapat dilihat pada pada tabel berikut :

Tabel 3.22.Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan III TA.2023

No.	Komponen	Nilai			Keterangan
		Target	Realisasi	(%)	
1.	Keaktifan	3	4	133,33	Keaktifan berupa keaktifan dalam memposting kegiatan yang bernilai 0,5 sebanyak 18 kali dengan nilai maksimal adalah 4

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Triwulan III tahun 2023 ini Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai 133,33%. Tercapainya target ini di didapat dari 1 (satu) komponen, yaitu keaktifan sebanyak 18 kali melakukan posting kegiatan pada aplikasi Collaboration Office dan dengan nilai maksimal adalah 4.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, serta monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan keaktifan pada aplikasi *bitrix.24* untuk Triwulan I dan II serta *Collaboration Office* untuk Triwulan III dan IV.

### **Indikator Kinerja 13**

#### **Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BRSDM.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit } \square \text{selon II}} \times 100\%$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu : Triwulan I sebesar 75,00%, s/d Triwulan II sebesar 75,00%, s/d Triwulan III sebesar 75,00%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 75%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 75%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 13 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	75	75	75	100,00	-	-	-

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan adalah sebesar 75% (100,00%) dari target 75%.

Capaian indikator kinerja tersebut disampaikan oleh Sekretaris BRSDM KP a.n. Kepala BRSDM KP melalui surat dinas No.B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal “Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”. Berdasarkan surat tersebut, BRPBATPP telah mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak

lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada Triwulan III sebesar 75% (100,00%).

Untuk perbandingan indikator kinerja ini dengan Triwulan III Tahun 2022 tidak dapat dilakukan karena indikator kinerja ini merupakan IKU baru sehingga tidak terdapat capaian pada tahun sebelumnya. Demikian juga perbandingan antara capaian Triwulan III dengan target Renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target pada tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi, yaitu antara lain adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BRSDM KP terkait aplikasi SIDAK yang memuat progress tindak lanjut rekomendasi dari Itjen KKP;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Itjen KKP terkait rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau Berita Acara Tindak Lanjut kegiatan evaluasi, pemantauan maupun audit yang dilaksanakan di BRPBATPP;
3. Membuat rekap rekomendasi Itjen KKP beserta berita acara tindak lanjut .

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, serta monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan dokumen tindak lanjut.

## **Indikator Kinerja 14**

### **Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)**

Definisi dari indikator kinerja ini adalah indikator Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ; Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ; Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Pengukuran indikator kinerja ini melalui formulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

#### 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

#### 2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari

- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\text{Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{ BPeg } n - RPD \text{ BPeg } n||}{RPD \text{ B Peg } n} \times 100$$

$$\text{Belanja Barang : DevDIPA Bbar} = \frac{||R \text{ BBar } n - RPD \text{ BBar } n||}{RPD \text{ B Bar } n} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal : DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{ BMod } n - RPD \text{ BMod } n||}{RPD \text{ B Mod } n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja :

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{Dev DIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{Dev DIPA BMod}||}{3}$$

### 3. Penyerapan Anggaran–Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

#### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

#### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

#### 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)

- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

## 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

- Rasio Dispensasi (permil)  $RDSPM = \left( \frac{SPM Dispensasi}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$

## 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)

- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah semesteran. Target pada Semester 1 adalah sebesar 82, sedangkan target pada Semester 2 adalah sebesar 89.

Tujuan dari penilaian IKPA ini menurut Kementerian Keuangan RI adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini adalah berupa : Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 14 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	89	-	-	-	-	89,00	105,96

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai IKPA BRPBATPP tidak terdapat target pada Triwulan III ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Progres indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 96,55. Berikut screenshot Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyserapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	73.41	100.00	94.00	100.00	99.90	100.00	99.26	96.55	100%	96.55
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.34	20.00	9.40	10.00	9.99	5.00	24.81			
					Nilai Aspek	86.71		98.78			99.26					

Gambar 3.8. Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan III TA.2023

Pada gambar di atas, dapat kita lihat perhitungan IKPA pada Triwulan III ini berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-5/PB/2022 masih belum memperhitungkan 13 indikator. Indikator yang diperhitungkan pada nilai IKPA Triwulan III meliputi 8 indikator dan 3 aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
  - a. Revisi DIPA (0%)
  - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- a. Penyerapan Anggaran (0%)
  - b. Belanja Kontraktual (10%)
  - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
  - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  - e. Dispensasi SPM (5%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
    - a. Capaian Output (25%)

Nilai total pada form penilaian IKPA adalah sebesar 96,55 didapat dari penjumlahan nilai akhir setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Sedangkan konversi bobot adalah sebesar 100% didapat dari bobot masing-masing setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Dari nilai total dan konversi bobot tersebut, kemudian didapatkan nilai IKPA BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 96,55. Nilai IKPA pada Triwulan III ini belum merupakan nilai akhir yang diambil sebagai nilai capaian akhir indikator kinerja ini. Diharapkan pada akhir Triwulan IV nanti, nilai IKPA dapat tercapai sesuai dengan aspek dan indikator yang menjadi kriteria perhitungan.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan pengukuran nilai IKPA.

## **Indikator Kinerja 15**

### **Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)**

Merupakan indikator kinerja yang terkait pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) Baik, apabila NKA >80 - 90; (c) Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan nilai kinerja anggaran BRPBATPP melalui aplikasi SMART DJA dengan formula perhitungan sebagai berikut :

***Formula Aspek Implementasi***

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau} \\ (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran  
terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

$W_p$  : bobot penyerapan anggaran

$W_k$  : bobot konsistensipenyerapan anggaran  
terhadap perencanaan

$W_{COP}$  : bobot capaian Output Program

$W_{CRO}$  : bobot capaian RO

### **Formulasi Aspek Manfaat**

$$NKA\ K/L = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan :

NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga

CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/  
lembaga atas aspek manfaat

$W_E$  : bobot efisiensi

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 \%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 82.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah : Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU.

Penilaian kinerja anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.25. Kategori Penilaian Kinerja Anggaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	> 90% - 100%	Sangat baik
2.	> 80% - 90%	Baik
3.	> 60% - 80%	Cukup / Normal
4.	> 50% - 60%	Kurang
5.	≤ 50%	Sangat kurang

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 15 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW III 2020-2021			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	82	-	-	-	-	86	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan III ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Berikut adalah progres nilai kinerja anggaran BRPBATPP berdasarkan aplikasi SMART DJA pada akhir September 2023 sebagai gambaran nilai kinerja anggaran BRPBATPP pada Triwulan III TA. 2023.



Gambar 3.9. Screenshot Dashboard Aplikasi SMART DJA Triwulan III TA.2023

Dari gambar diatas dapat dilihat sampai dengan Triwulan III ini nilai kinerja anggaran BRPBATPP masih dalam kategori sangat kurang dengan nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 43,61. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa output kegiatan yang belum tercapai / terealisasi, dimana akan tercapai di akhir tahun 2023 sehingga nilai kinerja anggaran yang tersaji pada dashboard aplikasi SMART DJA belum merupakan nilai akhir yang akan menjadi capaian balai.

Output diharapkan akan tercapai seluruhnya di akhir tahun, demikian juga dengan penyerapan anggaran diharapkan akan terus bertambah sejalan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Diharapkan, pada Triwulan III

nanti, nilai kinerja anggaran akan terus meningkat sehingga di akhir tahun target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja BRPBATPP pada tahun 2023 ini.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisan, serta monitoring penyerapan anggaran dan capaian output pada aplikasi SMART DJA oleh Sekretariat BRSDM KP. Selain itu juga memasukkan indikator kinerja ini ke dalam SKP pegawai yang terkait dengan pengukuran nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA.

## **Indikator Kinerja 16**

### **Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)**

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPBATPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan.

Dasar Hukum:

- a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP
- b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
- c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 2 (dua) kemitraan.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah :

1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll

## 2. Laporan Kegiatan Kemitraan

Capaian indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 16 pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan III ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Pada tahun 2023 ini, BRPBATPP telah memiliki 2 (dua) Kemitraan yang masih berjalan yaitu :

1. Kemitraan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran

Kemitraan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 yaitu tentang pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah dan atau bangunan BRPBATPP yang dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran yang berlangsung selama 3 tahun dan telah dilakukan perpanjangan kemitraan pada 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023.

Terkait masa berlaku pemanfaatan BMN sebagai lahan ATM yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 23 Desember 2023 nanti, BRPBATPP telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Sekretaris BRSDM KP dengan Nomor :B.465/BRSDM-BRPBATPP/PL.720/IV/2023 perihal “Usulan Perpanjangan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) pada BRPBATPP Bogor” tanggal 10 April 2023 untuk selanjutnya dapat diproses ke Biro Keuangan KKP dan untuk diajukan ke Kementerian Keuangan dalam rangka persetujuan pemanfaatan BMN tersebut.

Beberapa dokumen terkait kemitraan antara BRPBATPP dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran antara lain adalah :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-63/MK.6/WKN.8/KNL.03/2018 perihal "Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tanggal 28 Agustus 2018.
2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 590/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2018 tentang Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tertanggal 9 Oktober 2018.
3. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor sebagai berikut :

BRPBATPP : 02/BRSDM-BRPBATPP/PKS/V/2021

BRI Bogor Pajajaran : B.1308a -XIV/KC/LOG/05/2021

Progres sampai dengan Triwulan III tahun 2023 terkait perjanjian kerjasama ini antara lain adalah :

- (1) Telah diajukannya surat permohonan perpanjangan sewa lahan yang diperuntukan untuk ATM BRI ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.
  - (2) Telah dilakukan pertemuan dengan perwakilan KPKNL Bogor dalam rangka membahas penetapan harga sewa pada periode perpanjangan sewa lahan tersebut.
2. Kemitraan dengan PT. Caprifarmindo Laboratories

Kemitraan antara BRPBATPP dengan PT.Caprifarmindo Laboratories adalah berupa kerjasama lisensi dengan PT.Caprifarmindo Laboratories No.10/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2020 dan No.043/VIII/20/CAPRI-VET yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2020.

Tujuan dari kerjasama lisensi ini adalah : (1) Salah satu upaya transfer teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan perikanan, (2) Untuk mentransfer teknologi secara komersial atas vaksin Hydrogalaksi.

Perjanjian lisensi ini bersifat non eksklusif yang diberikan oleh BRPBATPP kepada PT. Caprifarmindo Laboratories yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor. Kegiatan komersialisasi yang dilakukan meliputi : (1) Produksi vaksin hydrogalaksi, (2) Promosi, distribusi, dan penjualan vaksin hydrogalaksi.

Kerjasama lisensi ini menghasilkan PNBPN dari pembayaran royalti dari PT. Caprifarmindo Laboratories sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga penjualan vaksin Hydrogalaksi di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.

Jangka waktu Kerjasama lisensi ini adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, dan akan berakhir pada 12 Agustus 2025.

Progres yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I antara lain adalah telah dilakukan pertemuan tindaklanjut Kerjasama Lisensi antara BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories , dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Rencana produksi, promosi, distribusi dan penjualan vaksin
2. Laporan tahunan, rencana produksi, realisasi dan besaran royalti tahun 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 mengacu pada perjanjian lisensi
3. Informasi terkait event SFV Desa (Ciamis) dan SVF UPT (Cijeruk), pihak PT.Caprifarmindo Laboratories dapat ikut mengambil bagian dalam rangka sosialisasi dan promosi vaksin (produknya) pada acara tersebut
4. Membahas terkait jangka waktu perjanjian kerjasama lisensi, dimana kerjasama lisensi berlaku sampai tahun 2025, sedangkan registrasi vaksin Caprivac hydrogalaksi sampai tahun 2027, sehingga diperlu direncanakan addendum penyesuaian
5. Telah dilakukan kolaborasi kegiatan sosialisasi produk vaksin Caprivac hydrogalaksi melalui kegiatan Sabtu Belajar
6. Bersama-sama telah mengikuti pelaksanaan evaluasi terkait pencapaian indikator luaran riset, penggunaan dana, pembelian barang, dan penilaian kontribusi mitra terkait program RISPRO Invitasi, yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Produksi Vaksin Koktail Aeromonas hydrophila Dan Streptococcus agalactie Dalam Skala Industri untuk Pencegahan Penyakit Pada Ikan Nila". Hal ini merupakan hasil dari dukungan pendanaan dari program Rispro

LPDP Kementerian Keuangan RI untuk pelaksanaan kerjasama lisensi antara BRPBATPP dengan PT.Caprifarmindo Laboratories. Kegiatan dilaksanakan di PT. Caprifarmindo Laboratories, Bandung Barat tanggal 23 Februari 2023.

7. Telah dilakukan koordinasi pembayaran untuk hasil royalti tahun 2022 dan telah dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2023.

Selain kemitraan yang masih berlangsung di tahun 2023 ini, BRPBATPP juga melakukan kegiatan inisiasi kemitraan dengan beberapa pihak, antara lain adalah :

1. PT. Pelangi Hotel Internasional

Tujuan inisiasi kerjasama yang dilaksanakan antara lain adalah: (1) Penjajakan kerjasama studi tour (Mina Eduwisata) melalui paket-paket wisata pendidikan, dan (2) Penjajakan kerjasama dalam rangka pemanfaatan aset untuk restoran, cafe dan glamping.

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III antara lain adalah :

- 1) Telah dilakukan pertemuan dengan PT.Pelangi Hotel Internasional dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan penawaran pihak PT.Pelangi Hotel Internasioanal (PT.PHI) terkait pola kerjasama di Mina Eduwisata Inris Cijeruk.
- 2) Telah dilakukan pembandingan terkait kegiatan serupa dengan Balitri, dimana masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait Pemanfaatan Aset untk Restoran, Cafe dan Glamping
- 3) Perlu ditindaklanjuti dengan ajuan proposal bisnis yang detail, sebelum dikoordinasikan lebih lanjut

2. PT. Mutu Internasional

Tujuan inisiasi kerjasama adalah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) aset laboratorium BRPBATPP.

Telah dilakukan pertemuan inisiasi kerja sama dengan PT. Mutu Internasional. Beberapa hal penting yang disampaikan antara lain adalah :

- 1) Dasar hukum kerja sama pemanfaatan aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BRSDM KP dalam memanfaatkan aset negara/daerah

dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara dimaksudkan untuk memaksimalkan aset adalah usaha organisasi untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan nilai aset khususnya laboratorium

- 3) Kerja sama pemanfaatan aset ini fokus pada laboratorium dengan 2 ruang lingkup pengujian, yaitu : air laut dan halal
  - 4) PT. Mutu Internasional melakukan visitasi ke Instalasi Pengendalian Penyakit Ikan Depok dalam rangka untuk melihat secara langsung peralatan laboratorium yang akan digunakan dalam kerjasama dan PT. Mutu Internasional diminta untuk menyiapkan proposal kerjasama pemanfaatan aset
  - 5) Tim BRPBATPP melakukan inventarisasi peralatan laboratorium dan menyiapkan data penerimaan PNBP dari laboratorium uji beberapa tahun terakhir
  - 6) Akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan Tim Keuangan dan Umum Setba dan Tim BRPBATPP
3. PT. Kharisma Trinitas Indonesia (KTI)

Tujuan inisiasi kerjasama adalah : dalam rangka pemanfaatan aset serta untuk menyusun mekanisme kerjasama pembuatan vasin ikan air tawar di Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan, Depok. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Telah dilakukan pembahasan inisiasi kerja sama antara BRPBATPP dengan PT.KTI. Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa hal terkait :
  - a. Kerja sama dalam pemanfaatan aset mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang atau melalui Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - b. Dasar hukum lainnya sebagai bahan pertimbangan melalui pemanfaatan aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 2) Pihak PT.KTI melakukan Visitasi ke Instalasi Pengendalian Penyakit Ikan Depok dalam rangka untuk melihat secara langsung peralatan laboratorium yang akan di gunakan dalam kerja sama.

- 3) Akan dilakukan pertemuan lanjutan antara BRPBATPP dengan PT.KTI untuk membahas terkait dengan bentuk dan konsep kerja sama yang akan digunakan.

## **Indikator Kinerja 17**

### **Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP (%)**

Indikator Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBATPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan :

- A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.
- C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis} \\ & \text{Lainnya} = \\ & \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\% \end{aligned}$$

Persentase dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia / dibandingkan total dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang ditargetkan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu: Triwulan I sebesar 23,36%, s/d Triwulan II sebesar 47,45%, s/d Triwulan III sebesar 71,53%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 100%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker atau Kepala Sub Bagian Umum.

Capaian indikator kinerja Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 17 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP (%)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	72,00	72,39	100	71,53	71,53	100,00	-1,19	100	71,53

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP adalah sebesar 71,53% (100,00%) dari target 71,53%. Untuk perbandingan persentase capaian Triwulan III Tahun 2023 terhadap target Renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 71,53%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan untuk capaiannya yaitu sebesar 0,86% (1,19%).

Hal ini disebabkan oleh jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan III Tahun 2023 lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan III 2022. Total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2023 adalah sejumlah 137 dokumen dengan capaian pada Triwulan III sejumlah 98 dokumen. Sedangkan untuk total seluruh

dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2022 adalah sejumlah 165 dokumen dengan capaian pada Triwulan III sejumlah 118 dokumen.

Berkurangnya jumlah dokumen sebagai data dukung capaian indikator kinerja ini adalah karena adanya perubahan data dukung berupa laporan dari masing-masing sub koordinator yang semula terbagi Tata Usaha, Tata Operasional serta Pelayanan Teknis dan Sarana, menjadi hanya ada satu berupa laporan balai, dan masih terdapat dokumen laporan–laporan lainnya yang dilakukan penyesuaian.

Hal yang menjadi faktor tercapainya target indikator kinerja ini pada Triwulan III adalah telah tersedianya dokumen pendukung Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP sejumlah 98 dokumen berupa :

1. Laporan Dalwas BMN 2022 berjumlah 1 dokumen
2. Dokumen Rekapitulasi aktifitas media sosial berjumlah 8 dokumen
3. Laporan Kegiatan Penjalinan Kemitraan (Kerjasama) berjumlah 1 dokumen
4. Laporan Layanan Magang/PKL/KKP (Triwulanan) berjumlah 3 dokumen
5. Reviu Renstra 2020-2024, Matriks Indikator kinerja dan Anggaran tahun 2020-2024 berjumlah 1 dokumen
6. Dokumen Revisi DIPA dan RKAKL BRPBATPP TA.2023 berjumlah 3 dokumen
7. DIPA dan RKAKL 2024 (indikatif dan definitif) berjumlah 1 dokumen
8. Laporan Kinerja Anggaran (semester 2 TA 2022 dan Semester 1 TA 2023) berjumlah 1 dokumen
9. Laporan e-monev Bappenas (Triwulan 4 TA. 2022 dan TW I TA.2023) berjumlah 3 dokumen
10. Laporan mingguan pada Dashboard BRSDMKP berjumlah 39 dokumen
11. Laporan bulanan BRPBATPP berjumlah 9 dokumen
12. Evaluasi Rencana Aksi BRPBATPP TA.2023 berjumlah 3 dokumen
13. Informasi Cascading dan Matriks Peran Hasil berjumlah 1 dokumen
14. CaLK Semester 2 2022 berjumlah 2 dokumen
15. CaLBMN Semester 2 2022 berjumlah 2 dokumen
16. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya berjumlah 9 dokumen
17. Pengendalian rutin pada kegiatan resiko tinggi lingkup BRPBATPP (SPIP) berjumlah 2 dokumen
18. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan e-Layar berjumlah 9 dokumen

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal

BRPBATPP, dan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan.

## **Indikator Kinerja 18**

### **Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP (%)**

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan persentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan. (1) Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan, (2) Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan, (3) Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screenshot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian indikator kinerja lain.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan :

- A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.

- C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

*Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis*

$$\text{Lainnya} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\%$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu : Triwulan I sebesar 18,52%, s/d Triwulan II sebesar 33,33%, s/d Triwulan III sebesar 48,15%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 100%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker atau kepala sub bagian umum.

Capaian indikator kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 18 Pada Triwulan III Tahun 2023

IK. Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP (%)									
Realisasi TW III			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	75,00	76,47	100	48,15	48,15	100,00	-37,03	100	48,15

Pada Triwulan III tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP adalah sebesar 48,15% (100,00%) dari target 48,15%. Untuk perbandingan persentase capaian Triwulan III Tahun 2023 terhadap target Renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 48,15%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan III, maka pada Triwulan III Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan untuk capaiannya yaitu sebesar 28,32% (37,03%).

Hal ini disebabkan oleh jumlah target dokumen pada Triwulan III Tahun 2023 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah dokumen pada Triwulan III 2022 namun memiliki capaian dokumen yang sama yaitu berjumlah 13 dokumen. Total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2023 adalah sejumlah 27 dokumen dengan capaian pada Triwulan III sejumlah 13 dokumen. Sedangkan untuk total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2022 adalah sejumlah 18 dokumen dengan capaian pada Triwulan III sejumlah 13 dokumen.

Hal yang menjadi faktor tercapainya target indikator kinerja ini pada Triwulan III ini adalah telah tersedianya dokumen pendukung Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP sejumlah 13 dokumen berupa :

1. Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Perikanan berjumlah 1 dokumen.
2. Laporan bulanan Lingkup Layanan Penyuluhan berjumlah 9 dokumen.
3. Laporan Triwulanan Lingkup Layanan Penyuluhan berjumlah 3 dokumen.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, dan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN III TA. 2023**

Pada tahun 2023, DIPA BRPBATPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp.47.130.248.000,- yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp.10.265.280.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp.36.864.968.000,-.

Sampai dengan akhir Triwulan III TA.2023, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPBATPP sebanyak 4 kali, yaitu :

1. Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023  
 Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 9 Februari 2022. Revisi dilaksanakan dalam rangka revisi halaman III DIPA. Revisi ke 01 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.130.248.000,-.
2. Revisi 02 DIPA BRPBATPP TA.2023  
 Revisi 02 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 29 Mei 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka pencatatan pagu pemanfaatan PNBP lingkup BRPBATPP TA 2023. Terdapat penambahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sejumlah 1 unit. Revisi ke 02 ini mengubah pagu anggaran awal karena terdapat penambahan 1 unit Rincian Output (RO) Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP, sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp.47.451.864.000.
3. Revisi 03 DIPA BRPBATPP TA.2023  
 Revisi 03 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 11 Juli 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka Revisi halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD). Revisi ke 03 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.451.864.000.
4. Revisi 04 DIPA BRPBATPP TA.2023  
 Revisi 04 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 15 September 2023. Revisi dilaksanakan dalam rangka Revisi halaman III DIPA dalam rangka pemutakhiran data POK. Revisi ke 04 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.451.864.000.

Tabel 3.30. Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
1.	Awal	30 November 2022	47.130.248.000	-
2.	Revisi ke 01	09 Februari 2023	47.130.248.000	Revisi halaman III DIPA
3.	Revisi ke 02	29 Mei 2023	47.451.864.000	Pencatatan pagu pemanfaatan PNBP lingkup BRPBATPP TA 2023
4.	Revisi ke 03	11 Juli 2023	47.451.864.000	Revisi halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan Rencana Penarikan Dana

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
				(RPD)
5.	Revisi ke 04	15 September 2023	47.451.864.000	Pemutakhiran data POK
6.	Revisi ke 05	11 Oktober 2023	47.451.864.000	Revisi halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Capaian realisasi anggaran BRPBATPP pada Triwulan III tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.31. Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023 (per jenis belanja)

No.	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Berdasarkan Pagu Revisi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	28.846.338.000	23.845.295.365	82,66
2	Belanja Barang	18.283.910.000	11.489.852.052	62,84
3	Belanja Modal	321.616.000	151.476.850	47,10
<b>Jumlah</b>		<b>47.451.864.000</b>	<b>35.486.624.267</b>	<b>74,78</b>

Catatan : Realisasi berdasarkan data OMSPAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan BRPBATPP pada tahun 2023, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output :

1) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3.805 Kelompok Masyarakat)

Rincian Output :

- a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (3.800 Kelompok Masyarakat)
- b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan (5 Kelompok Masyarakat)

- 2) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (1 Unit)
  - Rincian Output :
    - a. Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP (1 Unit)

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- 1) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal (4 layanan)
  - a. Layanan BMN (1 layanan)
  - b. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan)
  - c. Layanan Umum (1 layanan)
  - d. Layanan Perkantoran (1 layanan)
- 2) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal (42 orang)
  - a. Layanan Manajemen SDM (42 orang)
- 3) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3 dokumen)
  - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen)
  - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen)
  - c. Layanan Manajemen Keuangan (1 dokumen)

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di Triwulan III tahun 2023, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPBATPP di Triwulan III Tahun 2023.

Tabel 3.32. Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI TW III	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
<b>KEGIATAN 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP</b>									
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800	2.668	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	7.765.280	5.185.313.678	66,78%
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120	45				

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI TW III	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268	299				
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-				
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	2.500.000	872.432.106	34,90%
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1	-	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	321.616	151.476.850	47,10%

#### KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Nilai PNPB BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,229 atau 0,230 (pembulatan keatas pada aplikasi kinerjajaku)	Layanan BMN	30.500	23.141	75,87%
		8	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5	-	Layanan Manajemen Keuangan	41.500	24.284	58,52%
		9	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	Layanan Manajemen SDM	34.000	28.392	83,51%
		10	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran 601. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan	52.500	35.047	66,76%
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	Layanan Monitoring dan Evaluasi 601. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	47.500	38.770	81,62%
		12	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	133,33	Layanan Umum 602. Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Perikanan	25.500	13.179	51,68%
		13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	Layanan Umum 601. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan B. Dukungan Operasional Pimpinan	60.000	34.167	57,69%

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW III	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%		
	14 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	Layanan Umum 601. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan A. Pengelolaan Tata Usaha	42.939	29.510	68,73%		
	15 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	Layanan Perkantoran 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.450.988	5.081.908	68,20%		
	16 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	Layanan Hubungan Masyarakat	54.800	35.027	63,92%		
	17 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	71,53	Layanan Perkantoran A. Gaji dan Tunjangan Riset Perikanan	5.398.880	3.805.035	70,48%		
	18 Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	48,15	Layanan Perkantoran B. Gaji dan Tunjangan Penyuluh Perikanan (PNS, CPNS)	21.419.548	18.547.472	86,59%		
Layanan Perkantoran B. Gaji dan Tunjangan PPPK Penyuluh Perikanan				2.027.910	1.492.788	73,61%			
Layanan Umum 201. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan				118.700	72.858	61,38%			
Layanan Perencanaan dan Penganggaran 201. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				29.000	-	0,00%			
Layanan Monitoring dan Evaluasi 201. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				30.703	15.372	50,07%			
<b>TOTAL</b>					<b>47.451.864</b>	<b>35.486.624.267</b>	<b>74,78%</b>		

Tabel 3.33. Realiasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7.765.280.000	5.185.313.678	66,78
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	2.500.000.000	872.432.106	34,90
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	321.616.000	151.476.850	47,10
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	36.864.968.000	29.277.401.633	79,42
<b>TOTAL</b>		<b>47.451.864.000</b>	<b>35.486.624.267</b>	<b>74,78</b>

#### **D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBATPP TRIWULAN III TA.2023**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, yaitu : ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan

tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SMART DJA.

Tabel 3.34. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBATPP Triwulan III TA.2023

Penyerapan Anggaran (%)	Konsistensi (%)	Capaian Rincian Output (CRO)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi	Nilai NKA
78,30	97,76	7,85	0,72	51,79	43,61

Efisiensi anggaran BRPBATPP memperoleh skor 0,72. Untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BRPBATPP sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mencapai 43,61 dengan kategori sangat kurang. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran pada posisi 78,30% dengan tingkat capaian output kegiatan baru mencapai 7,85%.
2. Pada Triwulan III ini, capaian output baru mencapai 7,85%. Beberapa output yang tercapai pada Triwulan III berdasarkan perjanjian kinerja antara lain :
  - ✚ Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP dari target 2.500 kelompok tercapai 2.668 kelompok.
  - ✚ Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP dari target 40 kelompok tercapai 45 kelompok.
  - ✚ Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP dari target 210 kelompok tercapai 299 kelompok.
  - ✚ Nilai PNBK BRPBATPP dari target 0,092 Milyar tercapai 0,229 Milyar atau 0,230 Milyar (dibulatkan ke atas pada aplikasi kinerjaku).

- ✚ Persentase Unit Kerja BRPBATPP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dari target 92% tercapai 133,33%
- ✚ Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dari target 75% tercapai 75%
- ✚ Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP dari target 71,53% tercapai 71,53%
- ✚ Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP dari target 48,15%, tercapai 48,15%

Pencapaian efisiensi sebesar 0,72 menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan III Tahun 2023, masih belum cukup efisien dimana realisasi anggaran sudah besar namun untuk capaian output masih belum sebanding dengan realisasi anggarannya. Capaian output yang masih sedikit dibandingkan dengan target tahunan disebabkan oleh banyaknya output yang capaiannya di akhir tahun. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di Triwulan berikutnya atau di akhir tahun 2023 nantinya.



## **BAB IV. PENUTUP**

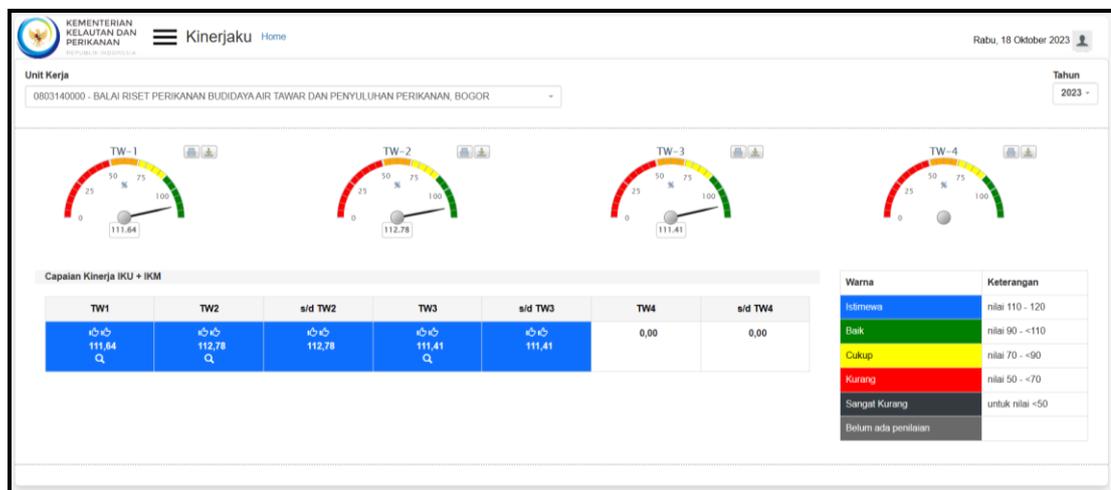
- A. CAPAIAN KINERJA UTAMA**
- B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**



## A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Triwulan III tahun 2023, BRPBATPP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 4 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP di Triwulan III tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing sasaran strategis. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh skor kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 111,41%, sebagaimana dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut :



Gambar 4.1. Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan III TA. 2023 pada Dashboard Kinerjaku

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan III TA. 2023, dari 18 IK BRPBATPP yang terdapat target ada 8 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90- <110. Rincian target dan realisasi dari 18 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan III Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800	2.500	2.668	106,72
	2 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120	40	45	112,50
	3 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268	210	299	142,38 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	-	-
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6 Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1	-	-	-
4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7 Nilai PNBK BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,229 (pembulatan ke atas pada aplikasi kinerjaku menjadi 0,23)	249,50 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	8 Batas tertinggi persentase nilai	≤0,5	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
	temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)				
	9 Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
	10 Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
	11 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
	12 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	133,33	144,93 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjajaku)
	13 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
	14 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-
	15 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	16 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
	17 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100,00	71,53	71,53	100,00
	18 Persentase layanan dukungan manajemen	100,00	48,15	48,15	100,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN III TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
	internal di Satminkal BRPBATPP (%)				

## B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja BRPBATPP masuk kedalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. IKU dengan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi capaian terutama untuk kegiatan penyuluhan perlu dilakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP. Akhirnya, BRPBATPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan III tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**

Jabatan : **Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : **Kepala Pusat Riset Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya  
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

  
Yayan Hikmayani

  
RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100

**Data Anggaran**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.239.107.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023</b>		<b>13.239.107.000</b>

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya  
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

  
Yayan Hikmayani

  
RR. Sri Pudji Sinarni Dewi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan

**Lilly Aprilya Pregiwati**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan

**R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**  
**DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp. 10.265.280.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	Rp. 23.625.861.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan</b>		<b>Rp. 33.891.141.000</b>

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan



R.R Sri Pudji Sinarni Dewi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Juni 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
Yayan Hikmayani

Pihak Kesatu  
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air  
Tawar dan Penyuluhan Perikanan



RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.239.107.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023</b>		<b>13.239.107.000</b>

Jakarta, 27 Juni 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Perikanan

  
Yayan Hikmayani

Pihak Kesatu  
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air  
Tawar dan Penyuluhan Perikanan

  
RR. Sri Pudji Sinarni Dewi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan Kelautan dan  
Perikanan

**Lilly Aprilya Pregiwati**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan

**R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**  
**DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp. 10.586.896.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	Rp. 23.625.861.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan</b>		<b>Rp. 34.212.757.000</b>

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan Kelautan dan  
Perikanan



**Lilly Aprilya Pregiwati**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan



**R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**  
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Juli 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan Kelautan dan  
Perikanan

**Lilly Aprilya Pregiwati**

Pihak Pertama  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan

**R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**  
**DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP (unit)	1
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp. 10.586.896.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	Rp. 23.625.861.000
<b>Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan</b>		<b>Rp. 34.212.757.000</b>

Jakarta, 10 Juli 2023

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan Kelautan dan  
Perikanan



**Lilly Aprilya Pregiwati**

Pihak Pertama  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan  
Perikanan



**R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi**